

Suluh Media

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK

Pentingnya Kapital Sosial dan Koproduksi

Novita Tresiana
Noverman Duadji

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Implementasi Kebijakan Publik
(Pentingnya Kapital Sosial dan Koproduksi)

Jeni Buku : Monograf

Penulis : Novita Tresiana dan Noverman Duadji

Instansi : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Penerbit : Suluh Media

ISBN : 978-623-7572-18-3

Edisi Cetakan : 2021

Bandar Lampung, Des 2021

Mengetahui/Menyetujui
Dekan,

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001

Penulis,

Dr. Novita Tresiana, S.Sos., M.Si.
NIP. 19720918 200212 2 002

Mengetahui,
Ketua LPPM Universitas Lampung

Dr. Lusmiellia Afrani, S.T., DEA.
NIP. 196505101993032008

DOKUMENTAS LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS LAMPUNG	
TGL	13-01-2022
NO. INVEN	005/B/B/NIF/ISIP/2022
JENIS	Monograf
PARAF	8

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK; Pentingnya Kapital Sosial dan Koproduksi

oleh Novita Tresiana; Noverman Duadji

Hak Cipta © 2021 pada penulis

Edisi Pertama; Cetakan Pertama ~ 2021

Suluh Media

Ruko Jambusari 7A Yogyakarta 55283
Telp: 0274-889398; 0274-882262

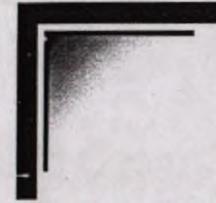
Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.

ISBN: 978-623-7572-18-3

Buku ini tersedia sumber elektronisnya

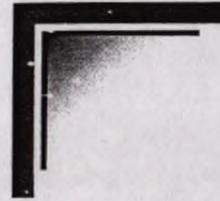
DATA BUKU:

Format: 17 x 24 cm; Jml. Hal.: xiv + 70; Kertas Isi: HVS 70 gram; Tinta Isi: BW; Kertas Cover: Ivori 260 gram; Tinta Cover: Colour; Finishing: Perfect Binding; Laminasi Doff.



UCAPAN TERIMA KASIH

1. Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM), Badan Riset dan Inovasi Nasional Kemendikbud Pendidikan Tinggi melalui pembiayaan Skema Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2020
2. Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM), Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui Pembiayaan Skema Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2019



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan, ketekunan dan kesabaran sehingga buku referensi yang sudah lama dipersiapkan ini akhirnya dapat diselesaikan dan hadir di hadapan semua pembaca yang budiman.

Kemajuan ilmu pengetahuan, peradaban dan kebutuhan menuntut akselerasi ilmu administrasi publik sebagai multiple & applied science yang didalamnya melingkupi kebijakan publik. Karenanya maka kajian kebijakan publik bergerak dinamis dan selalu berkembang pula, baik dalam konteks maupun dalam hal konten yang membutuhkan pemahaman tentang siklus atau daurnya, "formulasi, implementasi dan evaluasi".

Buku referensi ini dipersiapkan untuk semua pihak dengan target yang lebih luas, yaitu dosen, mahasiswa, praktisi dan pihak lain yang ingin lebih fokus untuk mengenal, mempelajari dan memperdalam kajian tentang kebijakan publik.

Uraian yang terdapat dalam buku referensi ini berangkat dari hasil penelitian tentang fenomena kegagalan implementasi kebijakan dan tujuannya adalah untuk menemukan faktor (dimensi) penjelas untuk mengantisipasi kegagalan implementasi kebijakan publik sebagai kebaruan (*novelty*) yang dikedepankan.

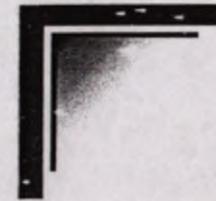
Sistematika buku referensi ini terdiri dari lima bab sebagai satu kesatuan yang tersusun logis, lugas dan disertai analitik atas bukti empirik sehingga sangat tepat menjadikan buku ini sebagai referensi.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu sehingga buku referensi ini dapat diterbitkan, khususnya kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM), Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui Pembiayaan Skema Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2019 dan 2020; Lembaga Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung yang telah memfasilitasi penerbitan buku referensi ini. Penulis juga merasa bahwa buku ini jauh dari sempurna, oleh karena itu segala masukan baik berupa saran maupun kritik yang membangun sangat diharapkan.

Akhirnya semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin belajar dan mendalami Kebijakan Publik.

Bandar Lampung, Juni 2021

Novita Tresiana & Noverman Duadji

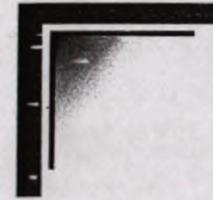


DAFTAR ISI

UCAPAN TERIMA KASIH	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Pentingnya Keberhasilan Implementasi Kebijakan <i>Gender Equality</i> Era Pandemi	2
1.2. Metodologi Penulisan Buku	4
1.3. Gambaran Umum Isi Buku	6
BAB 2 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK: MENGAPA LEBIH BANYAK KEBIJAKAN YANG GAGAL KETIMBANG BERHASIL?	9
2.1. Implementasi Kebijakan	9
2.2. <i>Democratic Governance</i> : Arah Perkembangan Studi Implementasi Kebijakan	15
2.3. Menghubungkan Kapital Sosial dan Koproduksi dalam Implementasi Kebijakan	16
2.4. Kesimpulan	21

BAB 3 MODEL SOCIAL ENGINEERING: MENGANTISIPASI KEGAGALAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN	23
3.1. Model Social Engineering	23
3.2. Aplikasi Model Social Engineering: Mewujudkan <i>Gender Equality</i> Melalui Koproduksi	26
3.3. Penutup	36
BAB 4 KAPITAL SOSIAL DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: SEBUAH KEBAHARUAN	37
4.1. Kapital Sosial dan Implementasi Kebijakan yang Berhasil	37
4.2. Kapital Sosial dan Kondisi Eksisting Industri Rumahan Perempuan di Kabupaten Lampung Selatan	41
4.3. Kapital Sosial: Kebaharuan dalam Implementasi Kebijakan	57
4.4. Penutup	58
BAB 5 PENUTUP	61
DAFTAR PUSTAKA	65

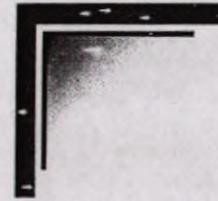
-00000-



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Rumah Tangga Rentan Covid 19 Berdasarkan Lapangan Usaha Utama dan Rumah Tangga Berdasarkan Status Pekerjaan utama	2
Gambar 3.1 Langkah Rekayasa Sosial	24
Gambar 3.2 Tahapan Pembangunan kesadaran	25
Gambar 3.3 Pembentukan/ Penguatan kelompok	25
Gambar 3.4 Model Kebijakan Rintisan Klaster Berbasis <i>The Triple Helix</i>	32
Gambar 3.5 <i>Model Social Engineering Mewujudkan Gender Equality Melalui Koproduksi</i>	35
Gambar 4.1 Modal Sosial Perempuan Pelaku IR	51
Gambar 4.2 Bangunan Kapital Sosial Perempuan Pelaku IR	54

-00000-



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.	Batas Desa Canti dan Waymuli Timur	43
Tabel 4.2.	Kondisi Pemerintahan Desa	43
Tabel 4.3.	Struktur Mata Pencaharian Desa Waymuli Timur	44
Tabel 4.4.	Struktur Mata Pencaharian dan Jenis Kelamin Masyarakat Desa Canti	44
Tabel 4.5.	Kategori Usaha IR	45
Tabel 4.6.	Pendapatan per minggu	46
Tabel 4.7.	Tabel Mutasi Usaha IR	46
Tabel 4.8.	Pelaku IR berdasarkan Pengalaman Sebagai TKI	46
Tabel 4.9.	Tenaga Kerja yang Terlibat IR menurut Jenis Kelamin	47
Tabel 4.10.	Jumlah Modal Usaha IR	47
Tabel 4.11.	Sumber Modal	47
Tabel 4.12.	Upah Pekerja	48
Tabel 4.13.	Jam Kerja per Hari	48
Tabel 4.14.	Penggunaan Teknologi Produksi	48
Tabel 4.15.	Perizinan yang Dimiliki	49
Tabel 4.16.	Jenis Perizinan yang Dimiliki	49
Tabel 4.17.	Wilayah Pemasaran Produk IR	49
Tabel 4.18.	Kepemilikan Rekening Bank	50

1

PENDAHULUAN

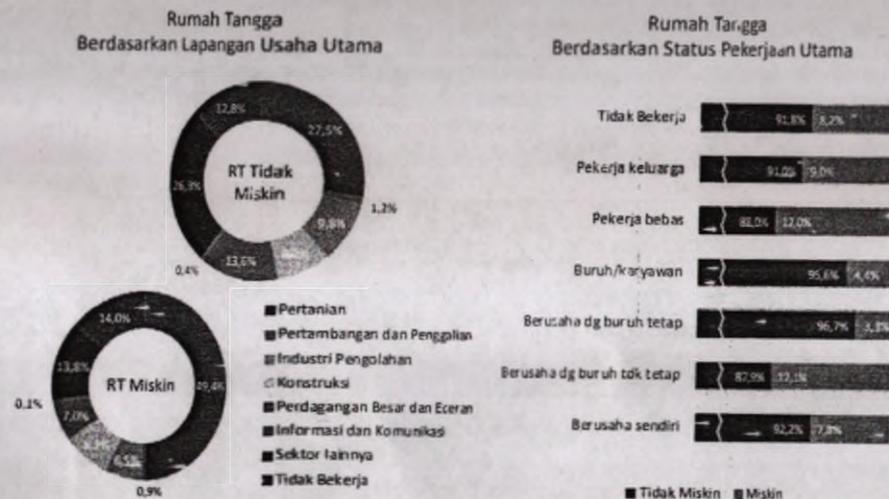
Implementasi kebijakan yang efektif di era pandemic, menjadi keharusan. Studi dilatarbelakangi dampak pandemic COVID 19 yang mengakibatkan nilai kemanusiaan, khususnya *gender equality* berada dalam posisi rentan. Perempuan pelaku industri rumahan di desa-desa, menjadi salah satu kelompok rentan yang memerlukan perhatian khusus, sebagai akibat perubahan mendadak kondisi ekonomi akibat hilangnya mata pencaharian dan lapangan pekerjaan. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6/2020 yang merevisi Permendesa 11/2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2020, dengan melakukan percepatan dan refocus program padat karya tunai desa (PKTD), melalui skema dana desa.

Penulisan bertujuan memahami kegagalan implementasi kebijakan dengan mengidentifikasi faktor dan variabel penjelas. Kebaharuan buku terletak pada hadirnya konfigurasi kapital sosial dan pendekatan koproduksi (keswadayaan) sebagai elemen kunciantisipasi kegagalan implementasi kebijakan.

Pada bab pendahuluan ini diuraikan pentingnya memahami keberhasilan implementasi kebijakan *gender equality* era pandemic, metodologi dan sistematika penulisan buku. Uraian pada bab pendahuluan ini sebagai *entry point* untuk mendudukkan pemahaman fenomena/masalah, tujuan, kerangka/perspektif teori dan kebaharuan buku. Pada bagian akhir pendahuluan, akan diuraikan gambaran umum keseluruhan isi buku dengan maksud untuk menghantarkan pembaca pada pembahasan yang lebih rinci.

1.1. Pentingnya Keberhasilan Implementasi Kebijakan Gender equality Era Pandemi

Pandemi COVID-19 telah memicu kemungkinan resesi sosial dan ekonomi yang berdampak langsung melemahkan kemampuan kelompok-kelompok rentan yang lama maupun yang baru dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sektor informal dimana sebagian besar kelompok rentan menggantungkan kehidupannya mengalami hantaman serius akibat COVID-19. Terdapat 1,6 juta warga terkena PHK dan dirumahkan. Salah satu kelompok yang memiliki resiko besar dampak dari Covid 19 adalah kelompok rumah tangga yang sebagian besar bekerja di sektor informal, dengan jenis kelamin didominasi perempuan. Tercatat pekerja informal perempuan sebanyak 61% dari total angkatan kerja. Sektor ekonomi kreatif paling banyak menyerap pekerja perempuan, yakni sebesar 53,86%. (Tresiana dan Duadji, 2019). Kelompok lama dan rentan baru ini, terutama yang ada di desa perlu mendapatkan perhatian khusus, sebagai akibat perubahan mendadak kondisi ekonomi akibat hilangnya lapangan pekerjaan.



Sumber: Tresiana dan Duadji, 2020

Gambar 1.1 Rumah Tangga Rentan Covid 19 Berdasarkan Lapangan Usaha Utama dan Rumah Tangga Berdasarkan Status Pekerjaan utama

Pelaku usaha Industri rumahan di desa, menjadi salah satu kelompok rentan, didominasi perempuan, terklasifikasi sektor informal, dengan kerja berbasis rumahan mandiri. Penelitian yang dilakukan Tresiana dan Duadji tahun 2019 di dua desa Kabupaten Lampung Selatan, mendapati pemerintah melalui kebijakan pengembangan industri rumahan dan dukungan kebijakan klusterisasi usaha, telah berhasil meningkatkan pendapatan, kemandirian, dan kemampuan wirausaha berbasis kapital sosial komunitas. Akan tetapi, krisis telah berdampak pada kelangsungan usaha mereka, sehingga menjadi kelompok rentan yang baru.

Untuk mengantisipasi kelompok rentan lama, termasuk yang baru, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6/2020 yang merevisi Permendesa 11/2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2020, dengan melakukan percepatan dan refocus program padat karya tunai desa (PKTD), melalui skema dana desa. Tujuannya : 1) untuk membuka lapangan kerja dan menjaga daya beli masyarakat pedesaan melalui dukungan ekonomi produktif desa, untuk menjaga pendapatan masyarakat desa dan aktifitas produksi pangan untuk ketahanan pangan di masa pandemic; 2) pencegahan dan penanganan Covid-19 di desa.

Dalam situasi krisis, segala bentuk kebijakan untuk kelompok rentan cenderung menempatkan mereka lebih sebagai obyek, mengingat situasi krisis menyebabkan kelompok rentan dalam posisi yang sangat lemah. Namun, agar penanganan terhadap kelompok rentan tetap terarah, melibatkan mereka dalam sejumlah aspek penanganan krisis sangat diperlukan. Diperlukan mekanisme memastikan nilai humanism, *gender equality* menjadi fondasi kebijakan, mengedepankan aspek inklusi. Hal ini mengingat situasi krisis bersifat non-diskriminatif, menjadikan nilai kemanusiaan, *gender equality* berada dalam posisi rentan.

Koproduksi atau keswadayaan, melihat kelompok rentan memiliki *tacit knowledge* berupa pengetahuan, nilai dan mekanisme kolektif yang digunakan dalam mendefinisikan kebutuhan dan kepentingan mereka, termasuk dalam dalam situasi krisis/pandemic. Ostrom (1996) menggambarkan dalam bentuk hubungan potensial pemberi jasa (pemerintah) yang resmi dengan warga yang menginginkan lingkungan tempat tinggal yang aman, anak didik yang pandai dan warga yang sehat, setara. Studi yang dilakukan Tresiana dan Duadji (2020), dalam keadaan krisis, koproduksi/

swadaya kelompok perempuan menunjukkan kemandirian dan kontribusi nyata dalam ekonomi keluarga sekaligus mencegah dan menjaga keamanan lingkungan.

Fokus permasalahan yang dikaji dalam buku ini adalah memahami mengapa lebih banyak kebijakan yang gagal diimplementasikan, dibanding yang berhasil. Beberapa studi literature melihat penyebab pokok implementasi hanyalah tentang bagaimana melakukan *command and control*, merumuskan kebijakan yang baik, dukungan teori yang kuat, kapasitas pemerintah (Lester, 1994). Namun masih jarang yang menghubungkan bagaimana mengantisipasi kegagalan implementasi dengan memperkuat kapital sosial dan pendekatan keswadayaan/koproduksi (Tresiana dan Duadji, 2020).

Pentingnya hal ini dikarenakan kapital sosial yang dimiliki sebuah komunitas diyakini dapat menolong diri sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan tanpa bantuan pemerintah. Hal ini akan membawa dampak positif yakni terciptanya keswadayaan melalui rasa memiliki yang kuat pada seluruh komunitas, dapat memicu keinginan yang kuat untuk memelihara semua hasil yang dicapai dan dibangun dengan jerih payah sendiri, baik prasarana dan sarana fisik maupun nilai-nilai sosial dan budaya yang merupakan pedoman hidup dan identitas kelompok sosial (Mernissi, 1997; Ostrom, 1996).

Tujuan buku adalah menganalisis menganalisis faktor atau variabel penjas dalam mengantisipasi kegagalan implementasi kebijakan, khususnya kebijakan *gender equality*. **Kebaharuan buku** terletak pada konfigurasi kapital sosial dan pendekatan koproduksi (keswadayaan) sebagai kunci antisipasi kegagalan implementasi kebijakan mewujudkan *gender equality*.

1.2. Metodologi Penulisan Buku

Tahun 2019-2020, Tim Penulis melakukan penelitian menggunakan survei, wawancara dan observasi terhadap informan kunci pada dua desa, yakni Desa Way Muli dan Desa Canti Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, Indonesia. Keduanya merupakan desa mewakili karakter desa pesisir sekaligus desa yang rawan bencana. Informan terdiri dari 101 perempuan pelaku usaha industri rumahan, pemerintah desa, kelompok masyarakat.

Tahun pertama (2019), Tim penulis memfokuskan penelitian dengan Tema "*Model Klaster Pengembangan Industri Rumahan dalam mewujudkan Gender equality Perempuan di Kabupaten Lampung Selatan*". Hasil yang diperoleh 1) pemetaan pelaku dan potensi pelaku industri rumahan perempuan dan 2) Dukungan kebijakan rintisan klaster (*sentra-sentra*) dengan menerapkan *triple helix*, sebagai bentuk kebijakan afirmatif yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan wirausaha perempuan dan penguatan industri rumahan perempuan di Kabupaten Lampung Selatan. Tahun kedua (2020), Tim penulis refocusing pada dampak COVID 19, yang membutuhkan skema baru penelitian yang berbasis swakelola dan swadaya menuju *gender equality*. Tema/judul tahun kedua "*Model Koproduksi Pengembangan Program Padat Karya Tunai Desa dalam Menaugkal Dampak Covid19 yang mendukung Gender equality di Kabupaten Lampung Selatan*".

Kedua penelitian berkaitan dengan tematik Pengarusutamaan *Gender* Dalam Pembangunan, *gender equality* menjadi tujuan dari studi. Beberapa studi pendahuluan dan hasil yang telah dicapai tim penulis berkaitan dengan dimensi: 1) potensi sosial budaya yang dimiliki institusi dan masyarakat yang mendukung *responsivitas gender*, 2) *governance*, 3) Inovasi Kebijakan. Beberapa hasil yang dicapai di tahun pertama (2019), menjadi dasar pijakan akan perlunya peta jalan studi yang mengarah inovasi pengembangan kebijakan-kebijakan yang tepat untuk ketercapaian kondisi perempuan pelaku usaha industri rumahan, yang menjadi kelompok rentan baru sebagai dampak COVID 19, sehingga dengan menggunakan model kebijakan baru menjadi energi baru untuk menyusun strategi penguatan kebijakan *gender equality*.

Beberapa publikasi Tim penulis menjadi pendukung studi, diantaranya: 1) Publikasi Tresiana& Duadji Tahun 2016 dan 2018 yang berjudul "*Multi Stakeholders Governance Body Model in Achieving The Excellence Public Policy*" dan "*Social Entrepreneur Model for Tourism Development in Kiluan Bay*", menggambarkan potensi dan modal sosial budaya masyarakat yang bisa dikembangkan untuk keberhasilan pembangunan; 2) Publikasi yang berkaitan dengan *governance* dan inovasi kebijakan *gender equality*, tergambar pada publikasi "*A Participation model based on community forum as reproductive health knowledge transaction space to indrease male participation in vasectomy*" (Duadji&Tresiana,2018). Rekomendasinya adalah pemanfaatan

ruang terbuka warga untuk ketercapaian *gender equality*; 3) Duadji (2012) "*Good Governance dalam Pemerintah Daerah*" merekomendasikan pemerintah lokal merevitalisasi dan mereformasi tata kelola hubungan pemerintah masyarakat melalui inovasi kebijakan dengan partisipasi masyarakat dalam tata hubungan yang baru; 4) Publikasi Tresiana (2015) "*Perumusan Kebijakan yang Berperspektif Gender di Propinsi Lampung*" perlunya kebijakan afirmatif untuk mengintegrasikan *gender* dalam setiap kebijakan pembangunan, perlindungan, kebijakan, *skill*, pendidikan dan kekuasaan diperlukan bagi perempuan; 5) Survei tahun pertama, menganalisis potensi Industri Rumahan di Kabupaten Lampung Selatan memperkuat perlunya pengembangan kebijakan pengarusutamaan *gender* yang tepat dan operasional.

1.3 Gambaran Umum Isi Buku

Uraian buku ini berfokus pada fenomena kegagalan implementasi kebijakan dan bertujuan menemukan faktor atau variabel penjas yang dapat mengantisipasi kegagalan implementasi kebijakan publik. Faktor atau variabel penjas menjadi kebaruan (*novelty*) dalam implementasi kebijakan publik.

Untuk membahas perspektif tersebut, isi buku ini terdiri dari empat bab. Bab pertama (pendahuluan), Tim penulis mengaitkan isu-isu *gender*, positioning perempuan pelaku usaha industri rumahan sebagai kelompok rentan di era pandemic COVID 19, sekaligus juga memiliki kapital sosial yang kuat dan potensi kemandirian/keswadayaan.

Bab kedua, berisi mempertanyakan implementasi kebijakan publik dan mengapa lebih banyak kebijakan publik yang gagal dibanding yang berhasil. Tim penulis menghadirkan *democratic governance* sebagai arah dan tantangan baru studi implementasi, memgemukakan bangunan kapital sosial dan koproduksi (keswadayaan sebagai bentuk aplikasi *democratic governance*).

Bab ketiga, berisi model rekayasa sosial (*social engeneering*) sebagai model penting untuk membangun keswadayaan (koproduksi) kelompok perempuan. Model berisi trigger (pemicu) dan *driver* (pendorong) merupakan mutual exclusive, tidak boleh meniadakan antara kualitas kapital sosial dan keberdayaan.

Bab keempat, berisi kapita! sosial sebagai faktor atau variabel penjas yang menentukan koproduksi (keswadayaan). Bab ini merupakan kebaruan buku, sebagai upaya mengantisipasi kegagalan implementasi kebijakan.

Bab kelima merupakan bagian akhir dari buku ini yang berisi kata-kata penutup (*closing statement*), sebagai rangkuman dari keseluruhan uraian dari buku. Pada bab ini juga dikemukakan beberapa rekomendasi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan baik secara teoritik maupun praktis.

-oo0oo-

2

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK: MENGAPA LEBIH BANYAK KEBIJAKAN YANG GAGAL KETIMBANG BERHASIL?

Arah perkembangan baru implementasi kebijakan berkaitan *democratic governance*, yaitu bagaimana membangun keswadayaan dan keberdayaan masyarakat sebagai salah satu langkah penting untuk mencapai keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi (Tresiana dan Duadji, 2021). Kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki kapital sosial, berupa seperangkat nilai sosial dan budaya yang menghargai pentingnya kerjasama didorong akan maju dan berkembang dengan kekuatan sendiri. Suatu kelompok masyarakat tidak cukup hanya mengandalkan bantuan dari luar untuk mengatasi kesulitan ekonomi, tetapi mereka sendiri juga harus secara bersama-sama memikirkan dan melakukan langkah-langkah terbaik guna mengatasi masalah tersebut dengan mengerahkan segenap potensi dan sumberdaya yang dimiliki, sementara bantuan dari luar dianggap sebagai pelengkap guna memicu inisiatif dan produktivitas yang muncul dari dalam masyarakat sendiri.

2.1. Implementasi Kebijakan

Secara ontologis, *subject matter* studi implementasi dimaksudkan untuk memahami fenomena mengapa suatu kebijakan publik gagal diimplementasikan di suatu lokasi/daerah tertentu. Upaya untuk memahami fenomena implementasi tersebut pada akhirnya dimaksudkan untuk dapat memetakan faktor-faktor apa saja (variabel penjelas) yang mempengaruhi munculnya berbagai fenomena implementasi tadi, apa sebenarnya faktor-

faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau pun kegagalan implementasi suatu kebijakan (Tresiana dan Duadji, 2020).

Pelopop implementasi kebijakan publik yaitu, Presman dan Wildavsky tahun 1970-an melakukan studi untuk memahami mengapa implementasi berbagai program yang dirancang pemerintah pusat cenderung gagal diimplementasikan oleh pemerintah negara bagian, dan sampai hari ini fenomena tersebut masih terus berulang. Berbagai kebijakan dan program pembangunan yang dirancang secara baik oleh pemerintah, ketika diimplementasikan jauh dari harapan. Fakta yang ada menunjukkan kondisi ideal yang tercantum dalam dokumen kebijakan sering mandeg ketika berhadapan dengan realita lapangan.

Keberadaan dan pentingnya implementasi kebijakan tersajikan di awal pada forum *the American Association for the Advancement of Science* pada tahun 1970 (Akib dan Tarigan, 2008; Rabin, 2001). Pakar dari Indonesia, Wahab (1991) dan beberapa penulis menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan. Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan (Birklan, 2001; Heineman et al., 1997; Ripley dan Franklin, 1986; Wibawa dkk., 1994). Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edwards III (1984) bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dike!uarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat.

Pemahaman umum mengenai pengertian implementasi kebijakan dapat diperoleh dari pernyataan beberapa ahli sebagai berikut : 1) Grindle (1980) bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran; 2) Parsons (1995) bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan;

3) Lane et all (2010), implementasi sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua bagian, pertama: *implementation = F (Intention, Output, Outcome)*, artinya implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk dan hasil dari akibat. Kedua: *implementation = F (Policy, Formator, Implementor, Intiator, Time)*, penekanan utama kedua fungsi ini adalah kepada kebijakan itu sendiri, kemudian hasil yang dicapai dan dilaksanakan oleh implementor dalam kurun waktu tertentu; 4) Van Meter dan van Horn bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan; 5) Anderson (1990), Implementasi kebijakan dapat dilihat dari empat aspek yaitu: 1. *Who is involved in policy implementation* (siapa yang mengimplementasikan kebijakan); 2. *The nature of the administrative process* (hakekat dari proses administrasi); 3. *Compliance with policy content* (kepatuhan kepada kebijakan); dan 4. *Impact* (efek dan dampak dari implementasi kebijakan); 6) Wahab (1991), memandang implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Pentingnya implementasi kebijakan, dilandasi beberapa alasan mengacu pada pandangan para pakar bahwa setiap kebijakan yang telah dibuat harus diimplementasikan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan diperlukan karena berbagai alasan atau perspektif. Edwards III (1984), berdasarkan perspektif masalah kebijakan, implementasi kebijakan diperlukan karena adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan dengan mengutamakan faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan pertanyaan retorik tersebut dirumuskan empat faktor sebagai sumber masalah sekaligus prakondisi bagi keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana, dan struktur organisasi termasuk tata aliran kerja birokrasi. Sementara Grindle (1980) dan Quade (1984) mengedepankan alasan konfigurasi dan sinergi dari tiga variabel yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yakni hubungan segi tiga variabel kebijakan, organisasi, dan lingkungan.

kebijakan. Harapan itu perlu diwujudkan agar melalui pemilihan kebijakan yang tepat masyarakat dapat berpartisipasi dalam memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya, ketika sudah ditemukan kebijakan yang terpilih perlu diwadahi oleh organisasi pelaksana, karena di dalam organisasi terdapat kewenangan dan berbagai jenis sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan atau program. Sedangkan penciptaan situasi dan kondisi lingkungan kebijakan diperlukan agar dapat memberikan pengaruh, meskipun pengaruhnya seringkali bersifat positif atau negatif. Karenanya, jika lingkungan berpandangan positif terhadap suatu kebijakan maka akan menghasilkan dukungan positif sehingga lingkungan berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi kebijakan. Sebaliknya, jika lingkungan berpandangan negatif maka akan terjadi benturan sikap sehingga proses implementasi terancam akan gagal. Lebih daripada ketiga aspek tersebut perlu pula dipertahankan kepatuhan kelompok sasaran kebijakan sebagai hasil langsung dari implementasi kebijakan yang menentukan efeknya terhadap masyarakat.

Secara praktis, implementasi kebijakan diperlukan untuk melihat kesesuaian dan relevansi model deskriptif yang dibuat. Hal ini sesuai dengan pendapat Mazmanian dan Sabatier yang merekomendasikan perlunya kerangka kerja analisis implementasi (Wahab, 1991). Menurut perspektif ini implementasi kebijakan diperlukan untuk mengetahui keefektifan dan relevansi kerangka kerja yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaannya. Mazmanian dan Sabatier, peranan penting analisis implementasi kebijakan negara ialah mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi pencapaian tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel yang dimaksud diklasifikasikan ke dalam tiga kategori umum, yaitu: 1) mudah atau sulitnya dikendalikan masalah yang digarap; 2) kemampuan kebijakan untuk mensistematisasi proses implementasinya; dan 3) pengaruh langsung variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam kebijakan. Ketiga variabel ini merupakan variabel bebas yang dibedakan dengan variabel terikat yakni implementasi yang harus dilalui. Kategori faktor mudah atau sulitnya suatu masalah dikendalikan dapat terlihat melalui: a) kesukaran teknis yang dihadapi, b) keberagaman perilaku kelompok sasaran, c) persentase jumlah kelompok sasaran dibandingkan dengan jumlah penduduk, dan d) ruang lingkup perubahan

perilaku yang diinginkan. Sedangkan kategori faktor kemampuan kebijakan untuk mensistematisasi proses implementasi mencakup: a) kejelasan dan konsistensi tujuan, b) ketepatan alokasi sumber daya, c) keterpaduan hirarki dalam dan di antara lembaga pelaksana, d) kejelasan aturan keputusan dari badan pelaksana, e) kesesuaian pola rekrutmen pejabat pelaksana, dan f) akses formal pihak luar. Kategori faktor di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi antara lain ditunjukkan melalui: a) kondisi sosial ekonomi dan teknologi, b) dukungan publik, c) sikap dan sumber daya yang dimiliki kelompok, d) dukungan dari pejabat atau atasan, dan e) komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat pelaksana (Keban, 2007). Sedangkan variabel terikat yang ditunjukkan melalui tahapan dalam proses implementasi meliputi: a) *output* kebijakan badan pelaksana, b) kesediaan kelompok sasaran mematuhi *output* kebijakan, c) dampak nyata *output* kebijakan, d) dampak *output* kebijakan seperti yang dipersepsikan, dan e) perbaikan.

Ada berbagai cara yang digunakan oleh pelaksana kebijakan agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Salah satu caranya adalah dengan mengembangkan kerangka pikir yang dibangun sendiri atau dengan cara mereplikasi, meng-kombinasi atau mensinergikan, dan mengembangkan pendapat para pakar mengenai model implementasi kebijakan. Pada pengembangan model tersebut dapat diketahui model mental para pakar dan implementor bersama kelompok sasaran kebijakan – minimal – berdasarkan relevansi dan keefektifan implementasi kebijakannya. Keberhasilan implementasi kebijakan atau program juga dapat dikaji berdasarkan proses implementasi (perspektif proses) dan hasil yang dicapai (perspektif hasil). Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain tata cara atau prosedur pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan pada perspektif hasil, program dinilai berhasil manakala programnya membawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan, atau sebaliknya. Dengan kata lain, implementasi kebijakan dapat dianggap berhasil ketika telah nampak konsistensi antara proses yang dilalui dengan hasil yang dicapai.

Mengacu pada pendapat Sabatier (1986) mengenai dua model yang berpacu dalam tahap formulasi kebijakan, yakni model *top down* dan model *bottom up*, refleksi kedua model tersebut dapat ditunjukkan pada tahap implementasi kebijakan dalam wujud yang sentralistik dan desentralistik, dilihat pada kondisi dan tempat dimana implementor mengambil keputusan dalam organisasi. Manakala putusan bertindak didominasi oleh keinginan implementor di tingkat pusat maka implementasinya bersifat sentralistik atau mereflesikan model *top down*, sementara itu ketika keputusan bertindak lebih banyak didasarkan pada inisiasi, kreasi, dan penyesuaian oleh implementor di tingkat bawah maka implementasinya bersifat desentralistik atau mereflesikan model *bottom up*.

David C. Korten (dalam Tresiana dan Duadji, 2020) meneguhkan kembali gagasannya tentang Model Kesesuaian implementasi kebijakan atau program dengan memakai pendekatan proses pembelajaran. Model ini berintikan kesesuaian antara tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program, yaitu program itu sendiri, organisasi pelaksana dan kelompok sasaran atau pengguna. Pada kesempatan lain Korten (1980) menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. *Pertama*, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). *Kedua*, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang dipersyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. *Ketiga*, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh *output* program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program. Berdasarkan pola pikir Korten dapat dipahami bahwa jika tidak terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi kebijakan maka kinerja program tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan. Jika *output* program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran maka jelas *output*nya tidak dapat dimanfaatkan. Jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang disyaratkan oleh program maka organisasinya tidak dapat menyampaikan *output* program dengan tepat. Atau, jika syarat yang ditetapkan organisasi pelaksana program tidak dapat

dipenuhi oleh kelompok sasaran maka kelompok sasaran tidak mendapatkan *output* program. Oleh karena itu, kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan mutlak diperlukan agar program berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

2.2. Democratic governance: Arah Perkembangan Studi Implementasi Kebijakan

Fenomena implementasi terkesan hanya mengeksekusi kebijakan yang sudah ada. Proses implementasi yang seperti itu, hanya menekankan tujuan yang dicapai, sedangkan mekanisme pencapaian dalam kelompok sasaran sangat minim.

Tresiana dan Duadji (2020) melihat upaya membangun arah perkembangan studi implementasi berkaitan dengan beberapa kritik baik teoritik maupun praksis. *Kritik pertama* berkaitan dengan sangat sedikitnya manfaat yang diterima dari studi implementasi, terutama untuk memajukan pendidikan dan pengajaran bidang kebijakan, sehingga banyak pakar menganjurkan agar para sarjana bergerak lebih lanjut melakukan studi sebagai *policy change and learning*, lebih fokus pada bagaimana merespon kebijakan yang gagal diimplementasikan dan bagaimana implementer belajar dari kegagalan tersebut. *Kritik kedua* berkaitan dengan konseptualisasi dan teori, terutama epistemology yang dipergunakan. Studi implementasi dinilai terlalu kompleks, dijelaskan dengan pendekatan positivis, yang mereduksi realitas implementasi menjadi variabel-variabel dan merangkainya dalam sebuah model. Idealnya, studi implementasi seharusnya dikembangkan dengan pendekatan yang lebih intuitif, dengan memberi ruang pada berbagai kemungkinan untuk mengeksplorasi penjelasan fenomena implementasi secara komprehensif.

Perkembangan selanjutnya memunculkan beberapa teori baru dalam studi implementasi (Tresiana dan Duadji, 2020), diantaranya: 1) *Communication Theory* (Goggin et al, 1990) yang membantu memahami hubungan komunikasi antara tingkatan pemerintahan dan fenomena implementasi melalui sintesis antara *top-down* dan *bottom-up*; 2) *Regim Theory*, menjelaskan pengaturan regim pelaksana implementasi dengan bangunan proposisi aktor memiliki nilai dalam proses implementasi, aktor menciptakan

kerangka kerja organisasi, akan terjadi konflik antara para aktor berkaitan tujuan kebijakan, pilihan menekar konflik dan melakukan kerjasama; 3) *Kontingensi* (Lester, 1994), menjelaskan keberhasilan implementasi dipengaruhi faktor komitmen dan kapasitas pemerintah; 4) *Ambiguity conflict model* (Matland, 1995), menjelaskan implementasi memunculkan *ambiguitas* dan konflik diantara pihak yang terlibat dalam implementasi; 5) *Trust and Involvement Theory*, menjelaskan kesuksesan implementasi ditentukan kepercayaan dan keterlibatan masyarakat sebagai kelompok sasaran; 6) *Policy Learning Model*, implementer merespon lingkungan dan memperhatikan efektifitas kebijakan, yaitu sejauhmana pemerintah belajar dari masa lalu mulai dari *learning, bureaucracy and bureaucrat, structure, motivation, time, detail*.

Perkembangan teori-teori implementasi di atas merupakan perubahan pendekatan kearah *democratic governance*. Menurut pendekatan *democratic governance*, penilaian terhadap kinerja implementasi melalui 2 tahap. Pertama: menilai keberhasilan partisipasi masyarakat, yaitu seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat untuk merancang program. Hal ini memiliki asumsi bahwa apabila kegiatan yang dirancang bersifat aspiratif dan bermanfaat bagi masyarakat luas, maka dinilai berhasil. Kedua: apakah program yang mereka rancang diimplementasikan dengan benar sehingga mencapai tujuan (Febryano et al, 2020).

2.3. Menghubungkan Kapital Sosial dan Koproduksi dalam Implementasi Kebijakan

Hubungan koproduksi dan kapital atau modal sosial dikemukakan pertama kali oleh Elinor Ostrom dalam sebuah tulisan yang berjudul "*Crossing the Great Divide: Coproduction, Synergy, and Development*" (Ostrom, 1996).

Kapital sosial dalam pembangunan ekonomi telah diteliti oleh sejumlah pakar terhadap berbagai kelompok masyarakat di beberapa negara. Ditemukan, modal sosial berperan penting dalam mencapai keberhasilan ekonomi mereka (Gittell, et al., 2001). Studi ini memperlihatkan bagaimana modal sosial berperan dalam menjalin kerjasama antara masyarakat dengan lembaga-lembaga keuangan yang diharapkan untuk membantu pengembangan usaha masyarakat. Pendekatan modal sosial ini merupakan alternatif dari strategi pengembangan ekonomi masyarakat

golongan ekonomi lemah yang lazimnya ditunjang dana yang berasal dari bantuan proyek yang dikelola pemerintah. Keberhasilan ini dimungkinkan karena prinsip dasar modal sosial yang menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dan kepercayaan baik antara sesama warga masyarakat maupun dengan pihak pemberi bantuan, telah dapat menggantikan jaminan berupa agunan yang merupakan peraturan standar dalam pemberian kredit bank pada umumnya. Agunan alternatif ini bisa diterima pihak bank karena dalam masyarakat sendiri telah terdapat kesepakatan untuk memikul tanggungjawab bersama dan saling mengontrol antara sesama warga. Penyimpangan yang dilakukan oleh seorang warga di dalam penggunaan dan pengembalian kredit tidak hanya dianggap sebagai masalah pribadi tetapi merupakan tindakan yang menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu masyarakat dapat menjatuhkan sanksi sosial terhadap warga yang menyebabkan hilangnya kepercayaan itu. Hal ini sejalan dengan pemikiran Coleman sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa "pilar utama modal sosial berupa struktur sosial yang menciptakan pengungkungan dalam sebuah jaringan sosial yang membuat setiap orang saling berhubungan sedemikian rupa, sehingga kewajiban-kewajiban maupun sanksi-sanksi dapat dikenakan kepada setiap orang yang menjadi anggota jaringan itu" (Coleman, 1988).

Gittell dan kawan-kawan (2001) melihat dua peranan lainnya yang dapat dimainkan modal sosial dalam upaya peningkatan kemampuan masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Peranan pertama berkaitan dengan bagaimana modal sosial dapat memperkuat kapasitas organisasi yang mewadahi kegiatan ekonomi. Mereka menganggap modal sosial sebagai aset dalam pengembangan ekonomi dapat dilihat dari kapasitas dan kinerja organisasi-organisasi berbasis komunitas, perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang berorientasi nirlaba dan badan-badan pemerintah. Berbagai bentuk lembaga pembangunan masyarakat dan organisasi berbasis masyarakat lainnya itu, misalnya, telah memainkan peranan utama dalam pengembangan ekonomi masyarakat miskin di banyak negara berkembang. Faktor-faktor kunci yang memberi sumbangan terhadap keberhasilan lembaga-lembaga pembangunan masyarakat itu termasuk keterampilan manajemen, kemampuan membuat perencanaan teknis dan kemampuan anggota personil dalam mengelola proyek, serta

kemampuan menjalin hubungan baik dengan warga masyarakat. **Peranan Kedua**, sejumlah lembaga dengan kemampuan organisatoris yang bekerja ditengah-tengah masyarakat miskin juga bisa memainkan peranan penting baik dalam mengembangkan modal sosial maupun mengorganisasikan masyarakat.

Sedangkan koproduksi dalam literatur tentang modal sosial digunakan pertama kali oleh seorang pakar bernama Elinor Ostrom dalam sebuah tulisan yang berjudul "*Crossing the Great Divide: Coproduction, Synergy, and Development*" (Ostrom, 1996). Koproduksi, menurut Ostrom, adalah suatu proses yang mencerminkan adanya peran aktif suatu kelompok masyarakat dalam penyediaan barang dan pelayanan yang ditujukan untuk kepentingan mereka. Adanya peran aktif itu menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya bersikap untuk dilayani tetapi ikut berpartisipasi melakukan segala hal yang menyangkut kepentingan ekonomi, sosial, politik dan budaya, serta kepentingan lain-lain demi kesejahteraan hidup mereka sebagai suatu kelompok sosial. Istilah koproduksi dimunculkan Ostrom untuk memperlihatkan hubungan potensial yang dapat dimanfaatkan antara pemberi jasa yang "resmi" (seperti polisi yang bertugas menjaga keamanan, guru yang mengajar di sekolah, dan pegawai puskesmas yang memberi pelayanan kesehatan, dan sebagainya) dengan warga yang menginginkan lingkungan tempat tinggal yang aman, anak didik yang pandai dan warga yang sehat.

Fenomena dalam hal pelayanan yang diberikan oleh petugas resmi tidak memberi manfaat yang optimal tanpa adanya koproduksi. Bagaimanapun ahlinya seorang dokter di Puskesmas dalam melakukan diagnosa dan memberikan terapi, misalnya, kecil kemungkinan seorang pasien akan sembuh seperti yang diperkirakan dokter, apabila ia tidak meminum obat sesuai dengan aturan dan tidak mengindahkan pantangan. Demikian pula, bagaimanapun pintarnya seorang guru memberi pelajaran kepada siswa, bila para siswa sendiri malas belajar dan orangtua mereka tidak memberi dukungan yang memadai untuk kemajuan pendidikan anaknya, maka sulit diharapkan sekolah tersebut menghasilkan lulusan yang bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa koproduksi akan lebih menjamin tercapainya hasil yang optimal, baik di dalam penyediaan barang dan bahkan terutama dalam pemberian jasa kepada masyarakat. Dalam keadaan tertentu partisipasi masyarakat,

yang merupakan bagian dari koproduksi, bahkan lebih berperan daripada pelayanan yang diberikan petugas resmi. Dalam keadaan jumlah personil kepolisian yang terbatas, misalnya, swadaya masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan sendiri melalui kegiatan "siskamling" akan sangat besar peranannya dalam mencegah terjadinya gangguan keamanan di lingkungan tempat tinggal.

Salah satu unsur Koproduksi adalah "swadaya masyarakat". Sistem swadaya ini beberapa tahun belakangan semakin mendapat perhatian, antara lain dari Bank Dunia (World Bank). Contoh pada Proyek Pengembangan Kecamatan (Kecamatan Development Project, KDP) yang dilaksanakan sejak Agustus 1998, misalnya, merupakan suatu contoh bagaimana Bank Dunia telah mengubah strategi dan kebijakan pemberian bantuan yang sebelumnya mempercayakan pelaksanaan pembangunan hampir sepenuhnya kepada aparat pemerintah dari tingkat pusat sampai ke daerah menjadi pembangunan yang lebih berorientasi pada kehendak dan kebutuhan masyarakat atau *community-driven development* (Edstrom, 2002). *Community-driven development* (PKM) berorientasi pada: 1) memberi peluang dan kendali kepada kelompok-kelompok masyarakat untuk mengambil keputusan dan pengelolaan sumberdaya; 2) Kebijakannya menganggap masyarakat sebagai aset dan mitra dalam proses pembangunan; 3) Dukungan meliputi penguatan dan pendanaan kelompok-kelompok masyarakat, fasilitas akses informasi bagi komunitas, dan mendorong tumbuhnya suasana yang kondusif bagi reformasi kelembagaan sosial (Alkire et al., 2001). Dengan demikian swadaya masyarakat (koproduksi) bukan saja dalam bentuk tenaga dan material, tetapi juga mencakup pemikiran untuk merencanakan dan melaksanakan sendiri proyek pembangunan yang ada di daerahnya, sedangkan fungsi dan peran pemerintah lebih terbatas sebagai pemberi dana dan fasilitator.

Edstrom (2002) *community-driven development* (CDD) atau "pembangunan dengan kendali masyarakat" (PKM) harus menjadi stimulan bagi masyarakat untuk kemudian bisa menjadi *self-propelling* atau berjalan sendiri tanpa bantuan dari luar. PKM terus berlanjut sekalipun bantuan sudah tidak lagi diberikan. Karenanya modal sosial yang dimiliki merupakan faktor yang sangat menentukan bagi keberhasilan program pembangunan. Modal sosial dalam bentuk rasa kebersamaan, saling percaya, kejujuran,

kerjasama, kelembagaan sosial yang dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta hubungan komunikasi yang baik antara sesama warga masyarakat maupun dengan pihak pemerintah dan penyandang kepentingan (*stakeholder*) lainnya.

Hubungan antara koproduksi (keswadayaan) dengan modal sosial ditunjukkan oleh beberapa studi (Fatema, 1997), diantaranya: 1) Fatema Mernissi, seorang pakar sosiologi Maroko, pada masyarakat di Ait Iktel, sebuah kawasan terpencil di pegunungan Atlas, Maroko, yang jauh dari sentuhan bantuan pemerintah, berhasil membangun sendiri berbagai fasilitas umum dan sosial, serta mengembangkan industri rumahtangga berkat adanya modal sosial yang baik dan hubungan yang erat dengan para perantau. Studi mendapati kunci keberhasilan sebuah komunitas dalam melaksanakan pembangunan: *Pertama* adanya organisasi atau perkumpulan yang merupakan wahana bagi warga untuk membicarakan dan menyepakati berbagai hal yang merupakan kepentingan bersama. *Kedua*, seluruh warga, tua dan muda, laki-laki dan perempuan, tanpa kecuali, mendapat tempat masing-masing dalam organisasi itu dan diikutsertakan dalam setiap pembicaraan yang menyangkut kepentingan bersama. *Ketiga* adanya peran dan partisipasi aktif dari seluruh warga dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memberi manfaat bagi kepentingan bersama. *Keempat* keikutsertaan dalam kegiatan untuk kepentingan bersama itu didorong oleh keinginan yang timbul dari kesadaran dalam diri sendiri tanpa adanya rasa terpaksa atau dipaksa oleh orang lain. *Kelima* setiap warga memberi kontribusi sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki masing-masing. *Keenam*, yang terakhir tapi tidak kurang pentingnya, tidak cepat patah semangat melihat masih jauhnya perjalanan yang harus ditempuh untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

Sebuah kesimpulan yang dapat ditarik dari kasus Ait Iktel ini adalah pembangunan yang dilakukan dengan swadaya murni tanpa bantuan dan intervensi dari pihak luar, membawa dampak positif yakni terciptanya rasa memiliki yang kuat pada seluruh warga. Adanya perasaan seperti itu telah menimbulkan keinginan yang kuat untuk memelihara semua hasil yang dicapai dan dibangun dengan jerih payah sendiri, baik prasarana dan sarana fisik maupun nilai-nilai sosial dan budaya yang merupakan pedoman hidup dan identitas kelompok sosial. Fatema (1997), banyak faktor-faktor yang juga

turut menentukan tingkat keberhasilan itu. Tantangan yang sangat besar, seperti miskinnya sumber daya alam, iklim dan cuaca yang tidak kondusif, bisa menjadi penyebab sulitnya suatu masyarakat mencapai kemajuan ekonomi.

Kemudahan artifisial yang berdampak buruk terhadap pengembangan modal sosial masyarakat inilah yang hendak diatasi dengan pendekatan koproduksi. Belajar dari berbagai kegagalan yang dialami dalam memberi bantuan selama puluhan tahun maka Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB) sejak beberapa tahun terakhir mulai menerapkan konsep PKM dan koproduksi dalam strategi dan kebijakan pemberian bantuan pembangunannya. Ini merupakan suatu langkah perubahan yang sangat drastis, karena inisiatif, perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan masyarakat desa yang sebelumnya merupakan tugas dan tanggungjawab pihak luar sekarang semuanya diserahkan kepada masyarakat sendiri (Edstrom, 2002). Pendekatan PKM dan koproduksi ini selain memberi peluang kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi lebih aktif dalam pembangunan terutama juga dimaksudkan untuk menghilangkan berbagai praktek di lingkungan birokrasi yang selama ini sering menjadi penyebab tidak efektifnya bantuan yang diberikan. Tetapi tampaknya tanpa adanya modal sosial yang kuat pendekatan koproduksi juga belum cukup menjamin hasil yang diharapkan akan tercapai. Sementara itu, ada pemikiran bahwa koproduksi bisa menciptakan modal sosial, terutama dalam hubungan antara warga masyarakat dan para pejabat pemerintah yang menjadi pelaku pembangunan. Pemikiran semacam ini juga digunakan badan-badan internasional seperti Bank Pembangunan Asia dalam menstrukturkan hubungan sinergis antara lembaga pemberi jasa dengan kelompok masyarakat yang mendapat pelayanan (Carroll, 2001).

2.4. Kesimpulan

Fenomena banyaknya kebijakan yang gagal di banding berhasil membutuhkan antisipasi. Alasan pertama, berkaitan dengan kerugian finansial (biaya) yang harus ditanggung masyarakat akibat kegagalan tadi. Alasan kedua hilangnya kesempatan karena kegagalan implementasi berbagai kebijakan dan program. Realitasnya, karena keterbatasan anggaran, setiap pilihan kebijakan pasti mengakibatkan pertukaran (*trade*

off), yaitu suatu kondisi dilematis yang harus dipilih oleh pemerintah karena keterbatasan anggaran. Berbagai kegagalan implementasi menimbulkan keprihatinan, karenanya dibutuhkan inisiatif untuk memahami bagaimana proses kebijakan sesungguhnya berjalan.

Implementasi kebijakan berlandaskan swadaya murni (koproduksi) tanpa bantuan dan intervensi dari pihak luar, pada beberapa studi penelitian dapat membawa dampak positif yakni terciptanya rasa memiliki yang kuat pada seluruh target sasaran. Adanya perasaan seperti itu telah menimbulkan keinginan yang kuat untuk memelihara semua hasil yang dicapai dan dibangun dengan jerih payah sendiri, baik prasarana dan sarana fisik maupun nilai-nilai sosial dan budaya yang merupakan pedoman hidup dan identitas kelompok sosial. Kesuksesan implementasi yang dilakukan dengan kekuatan swadaya dan modal sosial menjadi kerangka baru dalam implementasi kebijakan dan kunci dalam mengantisipasi, mengapa lebih banyak kebijakan yang gagal ketimbang yang berhasil.

-oo0oo-

3

MODEL SOCIAL ENGINEERING: MENGANTISIPASI KEGAGALAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Praktek-praktek model rekayasa sosial telah lama hidup di masyarakat, terutama ketika masyarakat mencari solusi secara mandiri atas kesulitan dan permasalahan hidup, utamanya dalam bentuk kreativitas masyarakat. Rekayasa sosial menjadi model strategi yang direkomendasikan sebagai jembatan mengantisipasi kegagalan implementasi kebijakan. Skema rekayasa sosial senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan (pemerintah).

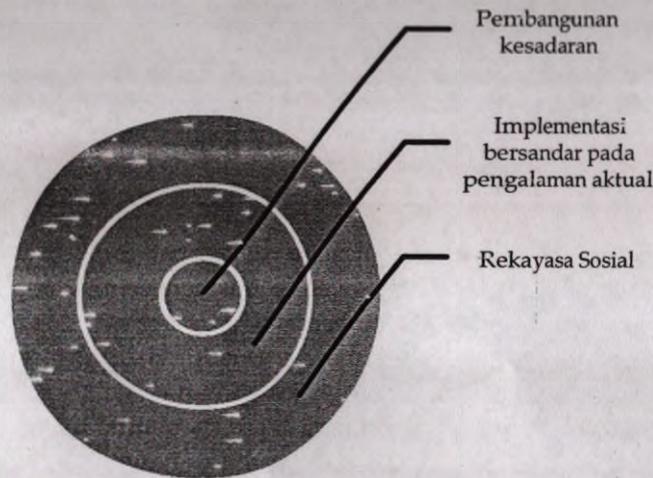
3.1. Model Social Engineering

Rekayasa Sosial adalah sebuah model pengembangan kebijakan publik yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat *“people-centered, participatory, empowering, and sustainable”* (Tresiana dan Duadji, 2020). Model ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan dimasa yang lalu. Shrestha (2015) pentingnya model rekayasa sosial dalam membangun kapital sosial. Melalui skema *Analisis Building Capital Social* maka parameter untuk melihat keberhasilan implementasi kebijakan dilihat dari keberhasilan dalam mengelola lingkungan komunitas melalui pembangunan kapital sosial yang meliputi 2 aspek utama, yaitu: *triger* dan

driver. Aspek pemicu (*Triger*) berupa mekanisme kapital sosial yang tepat berasal masyarakat berupa rangsangan lokal yang dihasilkan oleh kejadian alam kritis yang merangsang tindakan bersama untuk keuntungan kolektif, dukungan intervensi pembangunan dari luar lembaga, termasuk dampak pandemic Covid 19, isu lingkungan, kemiskinan, kebutuhan akan mata pencaharian dan peluang ekonomi, dan faktor sosial budaya wilayah. Aspek *driver* (pendorong) adalah komitmen pemerintah yang ditunjukkan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah.

Model social engeneering ini berkembang dari upaya banyak ahli dan praktisi untuk mencari apa yang antara lain oleh Friedmann (1992) disebut *alternative development*, yang menghendaki "*inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality and intergenerational equity*".

Adapun Rekayasa Sosial senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.

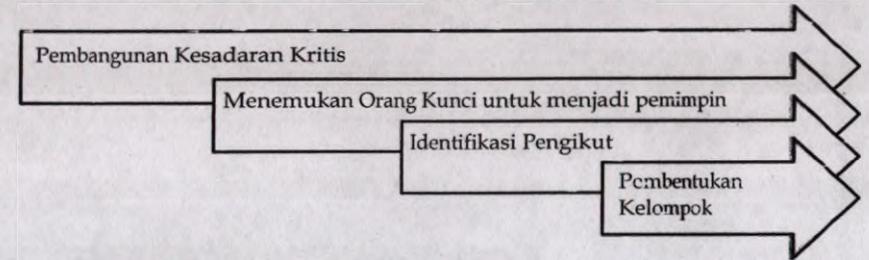


Gambar 3.1 Langkah Rekayasa Sosial

Model Rekayasa Sosial dilakukan melalui dua langkah tahapan, yaitu pembangunan kesadaran dan implementasi bersandar pada pengalaman actual (Wilcox et all,2019). Setiap langkah tahapan memiliki langkah sebagai berikut:

A. Pembangunan kesadaran

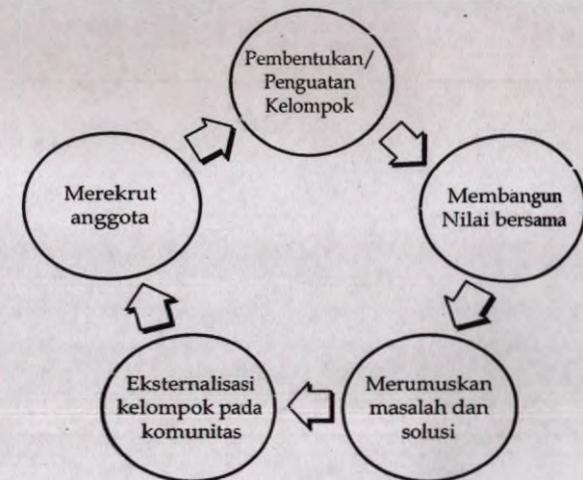
Pembangunan kesadaran Implementasi bersandar pada pengalaman actual Rekayasa sosial Tahapan Pembangunan kesadaran yang menjadi desain dalam rekayasa sosial adalah:



Gambar 3.2 Tahapan Pembangunan kesadaran

Langkah tahapan pembangunan kesadaran merupakan langkah awal paling sulit, karena menyentuh sisi kepedulian dan motivasi. Tahapan ini adalah merupakan logika tahapan yang bersifat longitudinal linier dari individu sampai membentuk kelompok.

B. Implementasi bersandar pada pengalaman actual



Gambar 3.3 Pembentukan/ Penguatan kelompok

Kondisi-kondisi kesamaan kepentingan, sumberdaya alam, sosial ekonomi, keakraban, saling mempercayai, dan keserasian hubungan antar masyarakat dapat faktor pengikat untuk kelestarian kehidupan kelompok, dimana setiap anggota kelompok dapat merasa memiliki dan menikmati manfaat sebesar-besarnya dari apa yang ada dalam kelompok. Kelompok biasanya sangat potensial karena dua hal penguat kelembagaan, yang menjadi kelebihan sebagai berikut:

Pertama, solidaritas kelompok yang berwujud: 1) Ikatan sosial yang sangat kuat karena didukung saling mengenal, akrab dan saling percaya diantara sesama anggota; 2) Mempunyai pandangan dan kepentingan yang sama dalam berusahatani; 3) Memiliki kesamaan dalam tradisi dan atau pemukiman, hamparan usaha, jenis usaha, status usaha, status ekonomi maupun sosial, bahasa, pendidikan dan ekologi; 4). Mudah terbangun pembagian tugas dan tanggung jawab sesama anggota berdasarkan kesepakatan bersama.

Kedua, keseragaman tujuan berupa: 1) Adanya kepentingan yang sama diantara para anggota; 2) adanya kawasan usaha ekonomi yang menjadi tanggung jawab bersama diantara para anggotanya; 3) adanya kader/tokoh yang berdedikasi untuk menggerakkan para anggota dan kepemimpinannya diterima; 4) adanya kegiatan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh sekurang-kurangnya sebagian besar anggota; 5) adanya dorongan atau motivasi dari tokoh masyarakat setempat untuk menunjang program yang telah ditentukan.

3.2. Aplikasi Model Social Engineering: Mewujudkan Gender equality Melalui Koproduksi

Model rekayasa sosial digunakan dalam studi penelitian yang dilakukan tim penulis selama 2 tahun. Tahun pertama (2019) tim penulis melakukan studi yang berjudul: "*Klaster dalam Pengembangan Industri Rumahan dalam Mewujudkan Gender equality di Kabupaten Lampung Selatan*". Selanjutnya tahun kedua (2020), tim penulis melakukan studi lanjutan yang berjudul "*Model Koproduksi Pengembangan Program Padat Karya Tunai Desa dalam Menangkal Dampak Covid 19 yang Mendukung Gender equality di Kabupaten Lampung Selatan*". Fokus/isu kedua penelitian adalah Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan sebagai pelaku Usaha Industri

Rumahan. Tema/Topik yang akan di capai adalah pengembangan model implementasi kebijakan *gender equality*.

Rekayasa sosial menjadi model strategi yang direkomendasikan sebagai jembatan peralihan menuju koproduksi (keswadayaan) perempuan pelaku IR yang mempromosikan *gender equality* (Friedmann,1992). Skema rekayasa sosial senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan (pemerintah).

Analisis rekayasa sosial dapat menjelaskan sejauhmana kesuksesan ketercapaian *gender equality* melalui proses kolaborasi potensi kapital sosial dan merespon program dari luar sistem kapital sosial tersebut sebagai daya dorong memaksimalkan proses pembangunan dan menjadi program yang berdampak pada kinerja kerjasama, level individu dan level komunitas, yang dilihat dari 2 proses yang saling mempengaruhi, yaitu: a) adanya *Triger*, merupakan dukungan mekanisme kapital sosial sebagai mekanisme natural yang dimiliki masyarakat berdasar kesamaan tujuan dari masyarakat, kesadaran membangun perekonomian bersama, kondisi atau situasi darurat tertentu, maupun dalam bentuk ketokohan baik secara politis, budaya, sosial maupun agamis; b) adanya *Driver*, political will yang kuat dari pemerintah berupa kebijakan, program dan bantuan dana.

Keberhasilan rekayasa sosial menuju *gender equality* terlihat dan tergambar dari kesuksesan 2 proses/tahapan, yaitu terbangun kesadaran kolektif dan implementasi program bersandar pada pengalaman aktual. Berdasarkan kedua proses ini, maka program penguatan ekonomi perempuan melalui model rekayasa sosial dapat menjadi alternative strategi peralihan menuju keberdayaan perempuan dan promosi *gender equality* yang dapat diterapkan pada kondisi lokal. Penelitian yang dilakukan oleh Tresiana dan Duadi yang berjudul Model Klaster Pengembangan Industri Rumahan dalam Mewujudkan *Gender equality* di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2019, menunjukkan bagaimana interaksi kelompok perempuan dalam komunitas menghasilkan motivasi dan membangun jaringan (hubungan timbal balik) yang menumbuhkan kepercayaan, kerjasama dan pelibatan berbagai pihak.

Gambaran skema implementasi model *social engineering* dimulai dari driver dan triger (Shrestha, 2015).

A. Driver Dukungan Kebijakan: *Cash for Work* Program Padat Karya Tunai Desa

Dukungan kebijakan *Cash for Work* atau padat karya tunai desa era COVID 19, menjadi skema baru dalam pengalokasian Dana Desa untuk peningkatan ekonomi masyarakat dan mengentaskan kemiskinan di desa. Skema yang mulai diterapkan pada Januari 2018 ini telah diarahkan secara swakelola. Swakelola dalam artian warga desa, termasuk perempuan akan terlibat aktif sebagai pekerja dalam beberapa program dan proyek desa dan mendapatkan upah. Padat karya tunai merupakan perbaikan pola penyaluran Dana Desa dari tahun-tahun sebelumnya.

Dengan mempertimbangkan dana desa sebagai instrumen strategis untuk mengentaskan kemiskinan, pemerintah optimis terhadap hasil skema padat karya tunai ini. Maka, demi akselerasi kesejahteraan masyarakat desa, pemerintah telah berkoordinasi untuk merumuskan kebijakan ini pada akhir tahun 2017 agar segera diterapkan pada Januari 2018, dan dilanjutkan hingga tahun 2020.

Skema padat karya tunai desa atau *cash for work* adalah, pola pelaksanaan dana desa yang berbentuk padat karya yang diharapkan bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dengan memberikan honorarium (upah) langsung tunai kepada tenaga kerja yang terlibat secara harian maupun mingguan. Padat karya tunai ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa, Pasal 127 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Pasal 128 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK/07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

Efek program padat karya, diharapkan terukur dampaknya terhadap pengangguran dan kemiskinan, tetapi juga berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas nasional. Dukungan kebijakan dapat meningkatkan daya saing dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), termasuk juga industri rumahan. Padat karya tidak membutuhkan teknologi canggih atau modal besar untuk memberdayakan sumber daya manusia, hanya dibutuhkan komitmen perangkat desa untuk menciptakan dan memberikan nilai tambah pada potensi unggulan di setiap desa. Adanya IR

perempuan pada 2 desa di Kabupaten Lampung Selatan, maka desa tersebut diberi anggaran, sehingga dengan bantuan penciptaan industri yang berkesinambungan, maka masyarakat desa akan menjadi mandiri tanpa terus menerus disokong dana pemerintah.

Skema program padat karya tunai di desa, dilaksanakan dengan beberapa kriteria. **Pertama**, kegiatan tersebut harus bersifat swakelola. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara mandiri oleh desa dan tidak dikontrakkan kepada pihak ketiga/kontraktor swasta, maupun kontraktor dari luar daerah. **Kedua**, kegiatan dalam program tersebut harus menggunakan sebanyak-banyaknya tenaga kerja setempat atau bersifat padat karya, sehingga bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja. **Ketiga**, kegiatan dalam program tersebut menggunakan bahan baku atau material setempat agar dapat menumbuhkembangkan usaha kegiatan ekonomi produktif di desa. Tujuannya agar dapat memberikan penghasilan kepada masyarakat, termasuk perempuan pelaku IR yang memiliki bahan baku. Dengan prinsip tersebut, maka Dana Desa tidak akan mengalir keluar desa tetapi hanya berputar di desa itu sendiri, sehingga memberikan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa setempat.

Skema program padat karya tunai perlu memperhatikan prinsip-prinsip tertentu agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Kegiatan yang menggunakan dana desa dialokasikan maksimal dalam lima kegiatan sesuai kebutuhan dan prioritas desa. Hal tersebut perlu dilakukan agar Dana Desa dapat lebih terarah dan memberikan upah yang lebih besar kepada para pekerjanya. Untuk besaran upah sendiri, ia menjelaskan bahwa minimal 30 persen dari nilai pekerjaan fisik digunakan untuk membayar upah pekerja. Selain itu, upah pekerja harus dibayarkan secara harian atau mingguan. Lebih jauh, Ubaidi menambahkan agar program Dana Desa diperuntukkan untuk kegiatan yang tidak memerlukan alat berat/alat besar. Dari segi cakupan kegiatan juga diperluas, yakni mulai dari pengadaan, pembangunan, pengembangan, maupun pemeliharaan. Agar memiliki dampak positif, proses pengerjaannya tidak dilaksanakan bersamaan dengan masa panen, sehingga dapat memberikan penghasilan kepada masyarakat ketika dalam masa transisi panen. Yang terakhir adalah perlunya memperhatikan

keberlanjutan penyediaan lapangan kerja selama setahun, serta melakukan optimalisasi peran dari pendamping desa.

Beberapa fokus program padat karya tunai desa di Kabupaten Lampung Selatan difokuskan pada beberapa bidang pembangunan di desa, diantaranya: 1) pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana prasarana perdesaan sesuai dengan daftar kewenangan dari desa, seperti perbaikan alur sungai dan irigasi, pembangunan atau perbaikan jalan dan jembatan skala desa, serta pembangunan tambatan perahu; 2) pemanfaatan lahan dalam rangka meningkatkan produksi, termasuk di kawasan hutan, kegiatan produktif lainnya, serta untuk pemberdayaan masyarakat; 3) kegiatan lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan fisik bangunan, tapi mendukung keberhasilan pelaksanaan pekerjaan fisik tersebut, seperti mengemudikan kendaraan pengangkut bahan dan alat kerja; 4) kegiatan pemberdayaan yang bersifat produktif dan berkelanjutan dengan melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Koperasi serta Unit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), termasuk industri rumahan. Program padat karya tunai bersumber dari Dana Desa, maka peruntukannya berdasarkan prioritas penggunaan Dana Desa yang terdiri dua bidang, yaitu bidang pembangunan fisik dan bidang pemberdayaan masyarakat.

Secara spesifik berdasarkan wawancara dan pengamatan (Juni 2020), beberapa program padat karya tunai desa dilaksanakan melalui kegiatan yang mendukung pencegahan dan penanganan Covid-19 di desa seperti pengelolaan air bersih, wastafel desa untuk cuci tangan, ruang karantina untuk ODP, pembuatan masker, hand sanitizer, belanja kesehatan warga.

B. Driver Dukungan Kebijakan Rintisan Klaster (Sentra-Sentra) dalam Pengembangan Industri Rumahan Perempuan

Penelitian tahun pertama (2019) yang dilakukan Tresiana dan Duadji, telah memetakan profil pelaku industri rumahan kelompok dan kebijakan pemetaan klusterisasi sebagai bentuk afirmatif pemerintah dalam mengembangkan industri rumahan perempuan dan menumbuhkembangkan wirausaha perempuan. Hasil penelitian tahun pertama telah melahirkan model klaster berupa "*Model Kebijakan Rintisan Klaster Industri Rumahan Berbasis The Triple Helix dalam Mewujudkan Gender Equity Perempuan*".

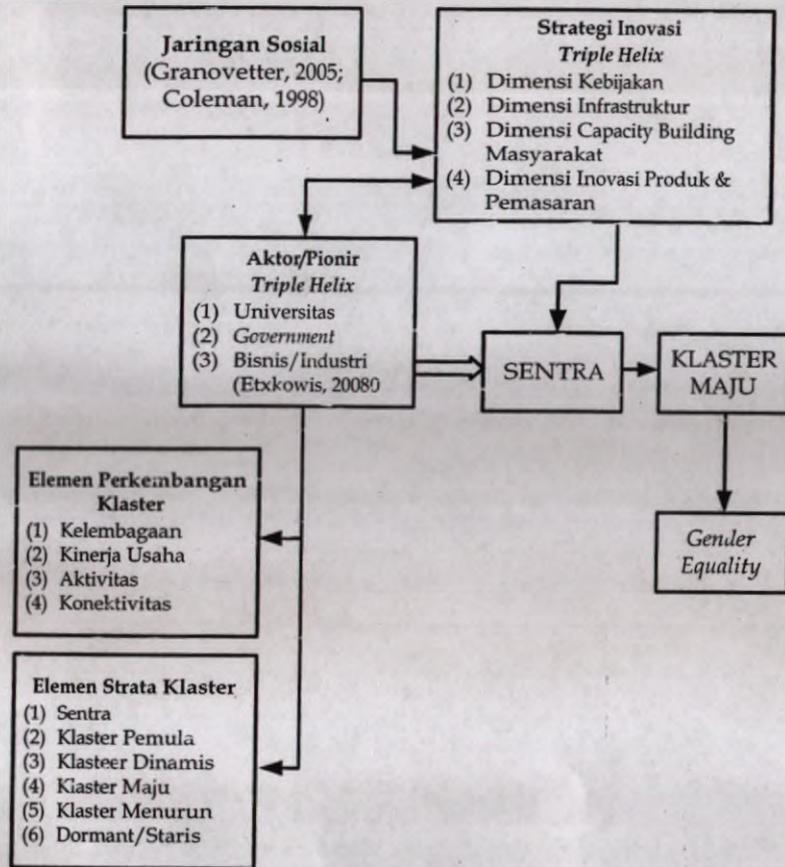
Studi penelitian mendapati tidak ditemukan klaster ideal/mature karena jasa layanan penunjang, lembaga penelitian tidak berada pada wilayah kerja klaster. Proses munculnya usaha inti dalam satu lokasi serta usaha penunjang yang dibutuhkan, dan menjalin kerjasama bertujuan untuk mencapai skala ekonomis yang saling menguntungkan. Proses perkembangan ke arah stratifikasi membentuk pola tertentu yang dapat diidentifikasi dari Institusional Linkage yang terbentuk, yang terbentuk dari pola hubungan horisontal, vertikal dan institusi.

Rintisan klaster berbentuk sentra, awalnya merupakan kelompok atau kumpulan para produsen suatu produk sejenis di kawasan desa yang berdekatan. Kerjasama usaha antar pelaku IR masih terbatas persaudaraan atau bahkan tidak ada sama sekali. Mereka hanya memiliki kesamaan jenis usaha (ikan laut dan pisang) yang secara geografis berkumpul dalam satu wilayah. Keberadaan mereka dalam satu wilayah geografis yang sama terjadi karena keberadaan sumberdaya alam yang mendukung perkembangan kegiatan produksi mereka. Sebagian besar pelaku IR belum mampu menggali peluang pasar, bahkan tidak mampu mengenali siapa target pasar mereka di luar kawasannya, berapa volume permintaannya. Aksesibilitas terhadap pasar menjadi rendah karena pasarnya lokal atau pembeli yang langsung datang kepada produsen.

Cambaran analisis tersebut sesuai dengan hasil analisis yang terdapat dalam beberapa tabel di atas. Belum ada konektivitas diantara pelaku, hal ini terjadi karena produk yang dihasilkan langsung dijual kepada pedagang atau konsumen tanpa ada pengolahan terlebih dahulu. Tergambar tidak ada motivasi untuk mengembangkan produk dan mendapatkan keuntungan yang lebih dari kerjasama yang ada dalam klaster tidak dapat tercapai. Efisiensi produksi yang diharapkan dapat mendorong mereka untuk bekerjasama dan memiliki spesialisasi tidak akan terjadi. Produk primer yang langsung dijual tidak menggunakan teknologi mesin dalam memproduksi.

Demikian juga halnya inovasi produk, tidak adanya inovasi karena motivasi mereka produk yang dihasilkan tanpa harus susah payah diolah sudah terjual. Secara teoritis ciri utama dari sentra adalah ciri peralatan dan teknologi masih tradisional dan belum mempunyai cara kerja yang efisien, serta belum mempunyai kemampuan dalam menggali pasar dan sama sekali tidak ada konektivitas pada kelompok usaha ini. Model triple helix

(Etzkowitz, Henry. 2008), yang mengidealkan sinergitas strategi kebijakan yang mengarah pada terjadinya lingkage antara pemerintah, swasta/ industri dan perguruan tinggi, tidak terjadi pada strata perkembangan klaster yang masih berupa sentra.



Sumber: Tresiana dan Duadji (2019)

Gambar 3.4 Model Kebijakan Rintisan Klaster Berbasis The Triple Helix

Selanjutnya dengan hasil arah dan stratifikasi klaster IR, maka the triple helix dapat berperan pada 4 dimensi sebagai elemen percepatan klaster ideal, diantaranya: 1) Dimensi Kebijakan Pemerintah Lokal (*Local*

Public Policy); 2) Dimensi Pemenuhan Sarana dan Prasarana (*Infrastructure*). Sarana dan prasarana yang dibutuhkan yakni berupa akses jalan raya yang layak, tersedianya “tempat”, yang dikaitkan dengan perkembangan desa, misalnya desa wisata, seperti area penjualan, tempat ibadah, rumah makan atau restoran dan tempat penginapan atau *home stay*; 3) Membangun Kapasitas Masyarakat (*Capacity Building*); 4) Inovasi Produk, dan Pemasaran (*Innovation*) (Porter, 1998).

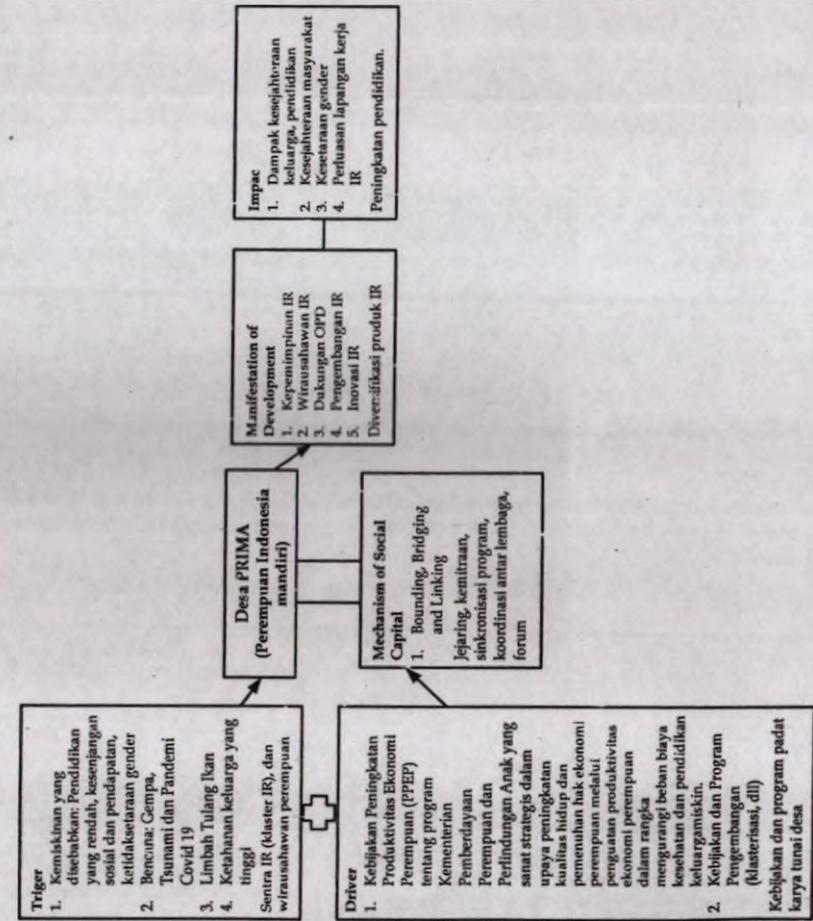
Strategi pembangunan *gender equality* Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP dan PA) yang telah memfokuskan kegiatan dan kebijakannya dalam upaya mengakhiri 3 (tiga) pokok utama, yang disebut 3ENDs, yaitu: (1) mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, (2) mengakhiri perdagangan manusia, dan (3) mengakhiri kesenjangan ekonomi antara laki-laki dan perempuan. Untuk ketercapaian END ke-3, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia mengeluarkan Kebijakan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP), dan di tahun 2016 kebijakan diaplikasikan dalam bentuk Kebijakan Pengembangan Industri Rumahan. Melalui regulasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor. 2 Tahun 2016, kebijakan Industri Rumahan memfokuskan pada salah satu komponen usaha mikro dan kecil yaitu pelaku usaha berbasis rumahan dengan kondisi kerja tidak layak, kurang mendapat perhatian pemerintah dan kemudian disejajarkan dengan terminology pelaku usaha industri rumahan (IR) yang berada di system ekonomi rumah tangga yang banyak melibatkan kaum perempuan. Industri rumahan (IR) sangat berpotensi besar dalam memperkuat ketahanan keluarga, baik dari aspek ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, serta relasi anggota keluarga yang lebih harmonis. Selain itu IR mendorong kemandirian perempuan di bidang ekonomi yang juga berdampak pada pengambilan keputusan. Hasil penelitian yang dilakukan Tresiana dan Duadji di tahun 1 (2019) mendapati mekanisme pengembangan IR di Indonesia, khususnya di Kabupaten Lampung Selatan, telah mendekatkan perempuan pelaku IR terhadap akses modal, akses informasi dan teknologi, akses pasar, akses pelatihan, melalui kebijakan klaster rintisan (sentra-sentra) usaha perempuan, sehingga pada akhirnya kesejahteraan keluarga dan ketahanan keluarga serta terjadi kehidupan berkelanjutan (*sustainable livelihood*).

C. Trigger melalui Pembangunan Kapital Sosial Masyarakat.

Adanya pandemi COVID-19 telah berdampak langsung melemahkan kemampuan, salah satunya kelompok perempuan pelaku IR. Pelaku Industri rumahan di desa, menjadi salah satu kelompok rentan, didominasi perempuan, sektor informal, dengan kerja berbasis rumahan. Penelitian yang dilakukan Tresiana dan Duadji di tahun pertama (2019) di dua desa Kabupaten Lampung Selatan, mendapati pemerintah melalui kebijakan pengembangan industri rumahan dan dukungan kebijakan klasterisasi usaha, telah berhasil meningkatkan pendapatan, kemandirian, dan kemampuan wirausaha berbasis kapital sosial komunitas. Akan tetapi, krisis telah berdampak pada kelangsungan usaha mereka, sehingga menjadi kelompok rentan yang baru. Untuk mengantisipasi kelompok rentan lama, termasuk yang baru, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6/2020 yang merevisi Permendesa 11/2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2020, dengan melakukan percepatan dan refocus program padat karya tunai desa (PKTD), melalui skema dana desa. Tujuannya : 1) untuk membuka lapangan kerja dan menjaga daya beli masyarakat pedesaan melalui dukungan ekonomi produktif desa, untuk menjaga pendapatan masyarakat desa dan aktifitas produksi pangan untuk ketahanan pangan di masa pandemic; 2) pencegahan dan penanganan Covid-19 di desa.

Sedangkan komunitas, perempuan pelaku usaha (industri rumahan) sebagai pihak yang diberdayakan menggunakan strategi pembangun kelembagaan lokal kelompok perempuan pelaku IR dilaksanakan dengan nuansa partisipatif sehingga prinsip kesetaraan, transparansi, tanggung-jawab, akuntabilitas, serta kerjasama menjadi muatan-muatan baru dalam pemberdayaan kelompok. Tresiana dan Duadji (2019) mengaitkan hal itu dengan penghidupan berkelanjutan (*sustainable livelihood*) menjadi pendekatan penting dalam strategi pembangunan *gender equality* berkaitan dengan dengan prinsip-prinsip:

- 1) Terpusat pada manusia (*people centered development*) dimana upaya pengurangan kemiskinan memerlukan kepedulian terhadap kebebasan dan pilihan manusiawi;
- 2) Pemberdayaan dimana pertumbuhan harus menghasilkan kebebasan berbicara, kesempatan yang setara dan kesejahteraan komunitas;



Sumber: Tresiana dan Duadji, 2020

Gambar 3.5 Model Social Engeneering Merwujudkan Gender equality Melalui Koproduksi

- 3) Responsif dan partisipasi dimana komunitas harus menjadi aktor penting dalam identifikasi maupun penjabaran prioritas kehidupannya;
- 4) Keberlanjutan dalam empat dimensi pokok yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan kelembagaan lokal, sosial dan kelestarian lingkungan. Suatu kelompok perempuan pelaku IR yang terbentuk atas dasar adanya kesamaan kepentingan eksis dan memiliki kemampuan untuk melakukan akses kepada seluruh sumberdaya seperti sumberdaya alam, manusia, modal, informasi serta sarana dan prasarana dalam pengembangan ushah yang dilakukannya (Tresiana dan Duadji, 2019).

Adanya Dukungan Pembangunan Industri Rumahan, program padat karya tunai desa (PKTD) memberikan 2 keuntungan, baik bagi wilayah (desa) maupun pelaku IR. Beberapa keuntungan tergambar: 1) Terbangun motivasi perempuan untuk maju; 2) Mengembangkan potensi perempuan dari semula belum berkembang menjadi berkembang; 3) Peran Perempuan dalam Penanggulangan Kemiskinan; 4) Meningkatkan kemampuan perempuan untuk berwirausaha; 5) Membangun kemampuan perempuan untuk berproduksi; 6) Memunculkan komitmen pemerintah daerah/desa; 7) Menjadi bagian dari kebijakan pemerintah; 8) Mendayagunakan sumber daya lokal; 9) Mengembangkan industri rumahan untuk terhubung dengan pasar yang lebih luas; dan 10) Membangun legalitas usaha mikro.

3.3. Penutup

Model social engenering dapat mengantisipasi kegagalan implementasi kebijakan, dikarenakan berbasis kesadaran kolektif dan implementasi program bersandar pada pengalaman aktual. Hal ini dapat diterapkan pada kondisi lokal. Model ini membantu mengembangkan dan dapat mendekatkan perempuan pelaku usaha industri rumahan terhadap akses modal, akses informasi dan teknologi, akses pasar, akses pelatihan. Hal ini pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan ketahanan keluarga serta kehidupan berkelanjutan (*sustainable livelihood*).

-oo0oo-

4

KAPITAL SOSIAL DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: SEBUAH KEBAHARUAN

Peran kapital sosial dalam proses implementasi kebijakan menjadi sangat penting dan lebih substantif. Apaiagi tata kelola sebenarnya banyak mengandalkan energi sosial yang dibangun secara otonom, kolboratif dan genuinely dari masyarakat. Dalam konteks inilah implementer biasanya perlu melakukan deformasi watak dan etikanya menuju *spiritual wisdom ethics*. Bagaimana kapital sosial dibangun, apa peran implementasi dalam proses ini, menjadi wacana kebaharuan dimasa depan berkaitan dengan kesuksesan implementasi kebijakan

4.1. Kapital Sosial dan Implementasi Kebijakan yang Berhasil

Bekerjanya Proses dan manajemen implementasi kebijakan ditentukan oleh deposit dan konfigurasi kapital sosial yang tersedia dalam wilayah publik. Bagaimana sinergi antar proses implementasi dan kapital sosial berjalan, bagaimana mengambil peran, dan bagaimana kapital sosial membangun watak implementer atau sebaliknya, semua itu adalah persoalan-persoalan primer yang menjadi kebaharuan dalam perspektif kekinian. Analisis ini relevan, utamanya untuk melihat, bagaimana sebenarnya kapital sosial yang tersedia dalam entitasnya memadai dan memberikan garansi bagi kesuksesan implementasi kebijakan.

Fukuyama memberikan batasan kapital sosial adalah : "...a set of informal values or norms shared among members of a group that permits cooperation

among them..." (serangkaian nilai-nilai dan norma informal yang dimiliki bersama diantara anggota-anggota atau oleh sebuah kelompok yang memungkinkan kerjasama diantara mereka). Kapital sosial itu sendiri menurut Fukuyama mempunyai akar teoritik yang kuat dengan kepercayaan. Hingga Fukuyama sampai pada suatu kesimpulan bahwa "... *social capital is a capability that arises from the prevalence of trust in a society or in certain parts of it...*" (kapital sosial adalah kapabilitas yang dihasilkan dari kepercayaan bersama dalam suatu masyarakat atau bagian dari masyarakat). Kepercayaan (trust) adalah salah satu visualisasi dari adanya kekokohan kolektif untuk memegang norma sosial untuk bekerjasama. Francis Fukuyama (1996) dalam bukunya *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity* ini juga melukiskan dalam berbagai contoh bagaimana sumber-sumber deposit kapital sosial antara lain norma-norma agama, ikatan-ikatan komunal dan kesukuan yang dalam kurun tertentu telah memberikan landasan istimewa untuk menjamin saling percaya.

Dibidang manajemen, teori kapital sosial mengkritik tipe manajemen yang dikembangkan oleh Taylor, yang sarat dengan jenjang hirarki. Perubahan organisasi menjadi struktur datar (*flat*) telah menyebabkan para pegawai lebih dekat dengan berbagai resorsis lokal sehingga terdorong secara otomatis untuk berprakarsa mengambil keputusan-keputusan penting secara mandiri tanpa tergantung dari atasannya yang mungkin jauh dari jangkauannya. Sehingga dalam praktek manajemen demikian lebih efisien.

Fungsi politik dari kapital sosial juga sangat penting. Misalnya dalam konteks demokrasi yang diperbincangkan oleh Robert A. Dahl adalah demokrasi yang memumpunserangkaian nilai-nilai akuntabilitas. Rendahnya kapital sosial dapat berakibat buruk pada proses demokrasi. Demokrasi mensyaratkan kedewasaan masyarakat untuk mampu mengorganisir dirinya dan menata model-model interaksi politik didalamnya. Masyarakat demokratis tanpa kekukuhan kapital sosial akan menciptakan pertentangan-pertentangan dan anarkisme. Karenanya demokratisasi akan terlindungi oleh format kohesi sosial yang tercipta secara otonom dalam masyarakat, yang disebut dengan kapital sosial. Demikian halnya pengamatan Fukuyama di beberapa negara Amerika Latin, bahwa renggangnya kepercayaan antar masyarakat melahirkan dualisme sikap sebagian besar politisi dan birokrat

di negara-negara itu. Sikap pertama, munculnya integritas perilaku yang baik dengan anggota keluarga dan teman-teman terbiasa sedang dipihak lain melahirkan perilaku-perilaku dalam ruang publik yang lebih luas. Sehingga fenomena ini menjadi landasan meluasnya korupsi.

Studi pengamatan sejenis berikut ini menggambarkan perbandingan institusi di Amerika dan Jepang. Diantara kelembagaan publik paling utama yang menentukan kemajuan industrialisasi di Jepang adalah adanya gugus perencanaan industrialisasi nasional yang disebut MITI (*Ministry of International Trade and Industry*). Lembaga ini berfungsi secara proaktif merencanakan jenis-jenis industri yang akan dipertandingkan dalam pasar internasional. Lembaga ini juga mempunyai otonomi penuh memberikan lisensi kredit dan pasokan modal kepada unit-unit industri yang mempunyai kompetensi teknis dan *skill* memadai. Amerika dan beberapa negara Afrika dan Amerika Latin telah mencoba mentranfer institusi ini kedalam negaranya, tetapi tak satupun dapat menandingi kehebatan peran MITI. Penelitian dan testimoni yang dilakukan secara luas menemukan, ada beberapa karakter kultural bangsa Jepang yang tidak dapat ditemukan dinegara lain yaitu: tingginya integritas para birokrat, tingginya level keterampilan dan profesionalisme, kuatnya penghormatan kepada otoritas yang lebih tua dalam masyarakat Jepang. Nilai-nilai inilah yang tidak dapat ditransfer ke tempat lain.

Bagaimana peran kapital sosial dalam kesuksesan implementasi kebijakan juga dikaitkan dalam kerangka kualitas pemerintahan. Beberapa penelitian perihal ini telah banyak dilakukan oleh para akademisi, antara lain adalah Robert Putnam (1993) yang melakukan penelitian di Italia, menegaskan bahwa pemerintahan-pemerintahan regional yang mengantongi kepercayaan publik lebih (*more trusting*) dan lebih berwatak kewargaan (*more civic minded*) lebih mampu menyediakan layanan-layanan publik lebih efektif dibanding tempat lain yang sifat-sifat kepercayaan dan karakter kewargaannya lebih rendah (Stephen Knack, 2000). Sementara itu penelitian sejenis juga dilakukan oleh La. Porta (dalam Tresiana dan Duadji, 2021) menetapkan sampel 30 negara di dunia, menyimpulkan masyarakat dengan derajat kepercayaan yang tinggi signifikan dengan membaiknya unjuk kerja pemerintah. Variabel yang diperbandingkan adalah keyakinan publik pada pemerintah dan efisiensi birokrasi yang ditunjukkan oleh pemerintah.

Persoalan yang penting dianalisis dalam perdebatan ini, dengan cara bagaimana kapital sosial memperbaiki kualitas pemerintahan. Ada tiga cara kapital sosial memperbaiki kualitas pemerintahan *Pertama*, pemerintah dapat memperluas jangkauan akuntabilitasnya karena responsive: pada kepentingan rakyat lebih luas dibanding dengan kepentingan-kepentingan kelompok yang lebih kecil. *Kedua*, dapat memfasilitasi kesepakatan-kesepakatan tatkala terjadi polarisasi kepentingan politik terjadi. *Ketiga*, memperbesar kapasitas inovasi dalam proses pengambilan keputusan ketika berhadapan dengan tantangan-tantangan baru (Stephen Knack, 2000).

Beberapa gambaran di atas, kesuksesan implementasi kebijakan berarti dimilikinya kualitas pemerintahan, yang tergambar dari kiprah dan kinerja yang dilakukan implementer kebijakan dalam merefleksikan kontur sistem nilai yang berlangsung di ceruk entitasnya. Kecerdasan aktor-aktor implementer termasuk didalamnya birokrat dan pejabat publik lainnya dalam memungut nilai-nilai ini, kemudian menginkorporasikannya dalam proses implementasi kebijakan adalah merupakan investasi penting agar pemerintah tak akan teralienasi dari publiknya. Karena itu persoalan nilai (*value sistem*) dalam implementasi kebijakan menjadi bagian sentral, sebagai bagian utama akuntabilitas pemerintah kepada publiknya (Muhadjir Darwin, 2000). Adanya kepercayaan dari publik yang besar, sikap integritas dan komitmen yang kuat dari para penyelenggara negara akan pentingnya "civic minded" secara iteratif dapat mempengaruhi kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Kontrol yang kuat dari publik sebagai bagian perasaan ikut mengambil peran besar dalam pemerintahan akan mampu mengurangi perburuan rente politik yang dilakukan oleh para birokrat.

Sebagaimana diamati oleh Putnam (1993) pada suatu entitas masyarakat yang intensitas interaksi dengan pejabat-pejabat publik tinggi maka ada kecenderungan inisiatif publik berkembang lebih baik utamanya dalam merespon isu-isu publik (Stephen Knack, 2000). Pemerintah yang mengintegrasikan karakter-karakter kepublikannya lebih intens akan dianggap oleh publik sebagai institusi yang mampu menyediakan benda-benda publik yang memberikan keuntungan dan jangkauan publik, sebaliknya negara yang egois hanya akan menyediakan barang-barang privat yang tidak mampu mendatangkan kemaslahatan publiknya.

Penelitian Putnam (1993) di negara-negara bagian yang menjadi obyek penelitiannya, semakin tinggi spirit kewargaan pada suatu entitas maka anggota masyarakatnya juga akan semakin mempunyai spirit publik yang lebih kuat sehingga berbagai kebijakan baru selalu direspon secara positif, demikian pula polarisasi akibat dominasi segelintir elit bisa dihindar ada *sense of civic obligation* yang menempatkan publik sebagai bagian paling elementer suksesnya implementasi kebijakan-kebijakan publik yang diprakarsai negara.

4.2. Kapital Sosial dan Kondisi Eksisting Industri Rumah Perempuan di Kabupaten Lampung Selatan

A. Kondisi Eksisting Profil Lokasi Industri Rumah

Kabupaten Lampung Selatan merupakan daerah di ujung selatan pulau Sumatera yang menjadi pintu gerbang masuknya arus orang, barang dan jasa ke provinsi-provinsi lain di pulau Sumatera maupun Provinsi Lampung secara khusus. Kabupaten dengan luas wilayah mencapai 2007,01 km² ini beribukota di Kota Kalianda. Secara administratif, wilayah Kabupaten Lampung Selatan mempunyai batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur; Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Sunda; Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pesawaran; Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa (Tresiana dan Duadji, 2020).

Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari 17 (tujuh belas) kecamatan dan selanjutnya terdiri dari desa-desa dan kelurahan sebanyak 251 desa/kelurahan (248 desa dan 3 kelurahan). Dengan garis pantai yang panjang terdapat 39 desa yang lokasinya dekat tepi laut, yaitu desa yang berada di Kecamatan Katibung, Sidomulyo, Kalianda, Rajabasa, Sragi, Ketapang dan Bakauheni. Wilayah di Sumatera masih banyak dikelilingi hutan. Ada sekitar 24 desa di Lampung Selatan yang lokasinya berada di sekitar hutan. Kecamatan Rajabasa merupakan kecamatan dengan jumlah desa terbanyak yang berada di sekitar hutan Jawa (Tresiana dan Duadji, 2020).

Laporan penelitian Tresiana dan Duadji (2020), menggambarkan penduduk Kabupaten Lampung Selatan secara garis besar dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu Penduduk Asli Lampung dan

Penduduk Pendatang. Penduduk Asli Lampung, khususnya sub suku Lampung Peminggir, umumnya berkediaman di sepanjang pantai pesisir, seperti di Kecamatan Penengahan, Kalianda, Katibung. Penduduk sub suku Lampung yang lain tersebar di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan. Penduduk yang berdomisili di Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari bermacam-macam suku dari seluruh Indonesia, seperti dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh dan lain-lain. Dari semua suku tersebut, yang merupakan penduduk pendatang yang terbesar adalah berasal dari pulau Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan Yogyakarta). Besarnya penduduk Lampung Selatan yang berasal dari pulau Jawa dimungkinkan oleh adanya kolonisasi pada zaman penjajahan Belanda, dan dilanjutkan dengan transmigrasi pada masa setelah kemerdekaan, disamping perpindahan penduduk secara swakarsa dan spontan. Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk tahun 2013 berjumlah 942.572 jiwa, yang terdiri dari 485.805 jiwa laki-laki dan 456.767 perempuan. Sex ratio penduduk atau perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan 106,36 yang berarti bahwa setiap 100 jiwa perempuan terdapat 106 laki-laki.

Kecamatan Rajabasa pada tahun 2014 dengan jumlah penduduk yang berumur 15 tahun lebih berjumlah 14 596 orang, dan 13.248 orang merupakan angkatan kerja yang bekerja dan sisanya merupakan angkatan kerja pengangguran dan bukan angkatan kerja. Sejalan dengan bertambahnya jumlah angkatan kerja, penduduk yang bekerja bertambah, Sebaliknya jumlah pengangguran menurun. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kecamatan Rajabasa yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya semakin meningkat.

Lokus Desa Canti dan Desa Waymuli Timur Kecamatan Rajabasa, merupakan sebagian dari desa-desa di Kabupaten Lampung Selatan yang berbatasan langsung dengan laut. Batas-batas kedua desa ini jika disandingkan dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1. Batas Desa Canti dan Waymuli Timur

Batas	Desa Canti	Desa Waymuli Timur
Sebeiah Utara	Desa Canggung	Gunung Rajabasa
Sebelah Selatan	Desa Banding	Selat Sunda
Sebelah Timur	Gunung Rajabasa	Desa Waymuli
Sebelah Barat	Laut	Desa Kunjir

Sumber: Dokumen Profil Desa Canti dan Desa Waymuli Timur

Desa Canti memiliki luas wilayah 6,68 km², sedangkan Desa Waymuli Timur memiliki luas wilayah 3,40 km². Secara umum, Desa Canti memiliki jarak ke Ibukota Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi lebih dekat dibandingkan dengan Desa Waymuli Timur.

Tabel 4.2 Kondisi Pemerintahan Desa

Desa	Dusun	RW	RT
Canti	4	-	11
Waymuli Timur	3	-	7

Sumber: BPS Kab. Lamsel, 2015B

Desa Canti terdiri dari 4 dusun dan 11 Rukun Tetangga (dapat dilihat pada tabel berikut ini). Pemerintahan Desa Canti di Kepala oleh seorang Kepala Desa, seorang Sekretaris Desa, lima orang Kepala Urusan (Kaur) dan empat orang Kepala Dusun. Sedangkan Desa Waymuli Timur terdiri dari 3 dusun, dan 7 Rukun Tetangga. Pemerintahan Desa Waymuli Timur dikepalai oleh seorang Kepala Desa, dibantu oleh seorang Sekretaris Desa, lima orang Kepala Urusan (KAUR), dan 3 orang Kepala Dusun.

Jumlah penduduk Desa Waymuli Timur 1.215 jiwa yang terdiri dari 640 jiwa laki-laki dan 575 jiwa perempuan dengan sex ratio 1,11 (BPS. Kab. Lampung Selatan, 2015). Dokumen Profil Desa Waymuli Timur menunjukkan struktur mata pencaharian masyarakat desa ini di dominasi oleh pedagang, petani dan buruh. Hal ini sesuai luas wilayah Desa Waymuli Timur dari 3,40 km² lebih didominasi oleh lahan bukan sawah sebesar 2,50 km² dan hanya 0,90 km² berupa lahan sawah. Selengkapnya, struktur mata pencaharian penduduk Desa Waymuli Timur tergambar pada tabel berikut ini.

Tabel 4.3 Struktur Mata Pencaharian Desa Waymuli Timur

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Pedagang	210
2.	Petani	135
3.	Buruh	115
4.	Tukang	15
5.	Swasta	15
6.	Guru	14
7.	Angkutan (supir)	10
8.	PNS	4
9.	Bidan	2
10.	TNI/Polri	1

Sumber: Dokumen Profil Desa Waymuli Timur (tanpa tahun)

Adapun jumlah penduduk Desa Canti 1.749 jiwa yang terdiri dari 916 jiwa laki-laki dan 833 jiwa perempuan dengan *sex ratio* 1.10 (BPS. Kab. Lampung Selatan, 2016). Dengan struktur luas lahan sawah mencapai 1,98 km² dan luas lahan non sawah mencapai 4,70 km² (BPS. Kab. Lampung Selatan, 2015) berbanding lurus dengan mata pencaharian pokok penduduk desa ini adalah petani, buruh migran perempuan, dan karyawan swasta. Jika lebih diperinci jenis pekerjaan dan jenis kelamin masyarakat Desa Canti maka akan didapat gambaran seperti tabel 4.4.

Tabel 4.4 Struktur Mata Pencaharian dan Jenis Kelamin Masyarakat Desa Canti

No	Jenis Pekerjaan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Petani	1.820	712	2.532
2.	Karyawan perusahaan swasta	45	67	112
3.	Buruh migran	15	12	27
4.	Nelayan	18	-	18
5.	Pedagang keliling	1	12	13
6.	Buruh tani	5	5	10
7.	PNS	2	6	8
8.	Pembantu rumah tangga	-	8	8
9.	Peternak	3	3	6
10.	Dukun kampung terlatih	-	2	2

No	Jenis Pekerjaan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
11.	Pengrajin industri rumah tangga	1	1	2
12.	Pengusaha kecil dan menengah	2	-	2
13.	Montir	2	-	2
14.	TNI	1	-	1
15.	Pensiunan PNS/TNI/Polri	1	-	1
16.	Seniman/artis	1	-	1
	Jumlah	1.917	828	2.745

Sumber: Dokumen Profil Desa Canti, 2016

B. Kondisi Eksisting Industri Rumahan di Kabupaten Lampung Selatan

Perkembangan industri rumahan di Kabupaten Lampung Selatan, sejak dilaksanakan program tahun 2016 sampai bulan Agustus 2020, menunjukkan perkembangan pasang surut, sebagaimana uraian di bawah ini.

Tabel 4.5 Kategori Usaha IR

No	Kategori Usaha	2019		2020	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Pangan (makanan/minuman)	101	100.00	101	100.00
2	Kerajinan	0	0.00	0	0.00
3	Penjahit	0	0.00	0	0.00
4	Lainnya	0	0.00	0	0.00
	Jumlah	101	100	101	100

Sumber: Updating 2020

Untuk jenis usaha tidak ada perubahan dari tahun 2016 sampai dengan 2020, semua pelaku usaha IR bergerak di pengolahan pangan. Olahan pangannya berupa bakso ikan, nugget ikan, mpek-mpek, kue kering, keripik pisang, keripik singkong, dan lain-lain. Saat ini ada olahan makanan baru yaitu kerupuk tulang ikan. Tulang ikan sisa pembuatan bakso ikan saat ini bisa diolah menjadi kerupuk tulang ikan. Produk tulang ikan ini sudah mulai dipasarkan dan ternyata banyak yang menyukai

Tabel 4.6 Pendapatan per minggu

No	Pendapatan	2019		2020	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	< 500.000	17	16.83	85	84,16
2	500.000 - 1.000.000	30	29.70	0	0
3	1.000.000 - 3.000.000	43	42.57	0	0
4	3.000.000 - 5.000.000	6	5.94	5	4.95
5	5.000.000 - 10.000.000	4	3.96	8	7.92
6	>10.000.000	1	0.99	3	2.97
Jumlah		101	100	101	100

Sumber: Updating 2020

Tabel 4.7 Tabel Mutasi Usaha IR

No	Keterangan	Jumlah	% (%)
1	Pindah	0.00	0.00
2	Berhenti produksi	0.00	0.00
3	Meninggal dunia	0.00	0.00
Jumlah		0	0

Sumber: Updating 2020

Selama program Industri Rumahan berlangsung para pelaku industri yang sebanyak 101 orang tidak ada yang pindah, berhenti produksi, maupun yang meninggal dunia. Jadi mereka tetap memproduksi olahan makanan seperti sebelum adanya program Industri Rumahan.

Tabel 4.8. Pelaku IR berdasarkan Pengalaman Sebagai TKI

No	Mantan TKI	2019		Ket	2020		Ket
		Jumlah	%		Jumlah	%	
1	Ya	27	26.73		27	26.73	
2	Tidak	74	73.27		74	73.27	
Jumlah		101	100		101	100	

Sumber: Updating 2020

Tabel 4.9. Tenaga Kerja Yang Terlibat IR menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	2019		2020	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Laki-Laki	36	16.74	53	22.84
2	Perempuan	179	83.26	179	77.16
Jumlah		215	100	232	100

Sumber: Updating 2020

Tabel 4.10. Jumlah Modal Usaha IR

No	Σ Modal	2019		2020	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	< 5 juta	94	93.07	97	96.04
2	5 juta - < 25 juta	6	5.94	0	0
3	25 juta - < 50 juta	1	0.99	4	3.96
Jumlah		101	100	101	100

Sumber: Updating 2020

Tabel 4.11. Sumber Modal

No	Sumber Modal	2019		2020	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Sendiri	34	33.66	40	39.60
2	Sendiri + Pinjaman dari LKM non-formal	34	33.66	55	54.46
3	Sendiri + Pinjaman dari LKM formal	33	32.67	6	5.94
Jumlah		101	100	101	100

Dalam menjalankan usahanya modal yang digunakan sebagian besar berasal dari modal sendiri dan pinjaman dari LKM non formal di tahun 2020 sebanyak 55 orang (54,46%), sedangkan yang memiliki modal sendiri dalam menjalankan usahanya sebanyak 40 orang (39,60%).

Tabel 4.12. Upah Pekerja

No	Besaran Upah	2019		2020	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	< 500.000	110	51.16	170	73.28
2	500.000 - 750.000	33	15.35	0	0
3	750.000 - 1.000.000	3	1.40	0	0
4	1.000.000- 2.000.000	0	0.00	0	0
5	>2.000.000	7	3.26	0	0
6	Bagi Hasil	12	5.58	10	3.02
7	Tidak ada	50	23.26	52	22.41
Jumlah		215	100	232	100

Sumber: Updating 2020

Pekerja di industri rumahan ini biasanya dilakukan oleh pemilik usaha sendiri atau dibantu oleh keluarganya. Ada sebanyak 170 orang (73,28%) pekerja yang mendapat upah dibawah Rp 500.000,00, yang berarti jauh dibawah UMK Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp. 1.800.500,00.

Tabel 4.13. Jam Kerja per Hari

No	Durasi Jam Kerja	2019				2020			
		Jumlah		%		Jumlah		%	
		P	L	P	L	P	L	P	L
1	< 5 jam	79	31	44.13	86.11	62	22	34.64	41.51
2	5 - 8 jam	42	2	23.46	5.56	36	18	20,11	33,97
3	>8 jam	58	3	32.40	8.33	81	14	45,25	26,42
Jumlah		179	36	100	100	179	53	100	100

Sumber: Updating 2020

Tabel 4.14. Penggunaan Teknologi Produksi

No	Teknologi Produksi	2019		2020	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Manual	92	91.09	80	79.21
2	Semi manual/ teknologi sederhana	9	8.91	21	20.79
3	Teknologi tinggi	0	0.00	0	0.00
Jumlah		101	100	101	100

Sumber: Updating 2020

Dalam memproduksi olahan makanannya pelaku industri rumahan masih banyak yang menggunakan teknologi produksi secara manual yaitu sebanyak 92 (91,09%) pada tahun 2019 dan berkurang menjadi 80 orang (79,21%) pada tahun 2020.

Tabel 4.15. Perizinan yang Dimiliki

No	Perizinan	2019		2020	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Ada	5	4.95	9	8.91
2	Tidak Ada	96	95.05	92	91.09
Jumlah		101	100	101	100

Sumber: Updating 2020

Dari 101 pelaku industri rumahan yang ada, yang memiliki izin sebanyak 5 orang (4,95%) di tahun 2019 dan pada tahun 2020 ada 9 orang (8,91%) yang memiliki izin. Saat ini untuk kepengurusan izin PIRT sedang dalam proses di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan.

Tabel 4.16. Jenis Perizinan yang Dimiliki

No	Jenis Perizinan	
	2019	2020
1	Izin pendirian usaha	Izin pendirian usaha
2	PIRT	PIRT
3*	IUKM

Sumber: Updating 2020

Tabel 4.17. Wilayah Pemasaran Produk IR

No	Wilayah Pemasaran	2019		2020	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Sekitar desa	70	69.31	58	57.43
2	Luar desa	25	24.75	16	15.84
3	Luar kecamatan	5	4.95	22	21.78
4	Luar kabupaten	0	0.00	0	0.00
5	Luar provinsi	1	0.99	5	4.95
Jumlah		101	100	101	100

Sumber: Updating 2020

Pemasaran produk industri rumahan dari Desa Canti dan Desa Way Muli sebagian besar yaitu 69,31% pada tahun 2019 dan 57,43% pada tahun 2020 masih di sekitar desa. Pada saat ini untuk memasarkan produk industri rumahan ini, telah menggunakan salah satu kios yang berada di rest area Masjid Agung Kubah Inten Kalianda.

Tabel 4.18 Kepemilikan Rekening Bank

No	Kepemilikan Rekening Bank	2019		2020		Keterangan (Bank)
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1	Punya	28	27.72	39	38.61	BRI, BNI, BUKOPIN, MANDIRI
2	Tidak Punya	73	72.28	62	61.39	
Jumlah		101	100	101	100	

Sumber: Updating 2020

Sebagian besar pelaku industri rumahan tidak memiliki rekening bank yaitu 72,28%. Alasan mereka tidak memiliki rekening bank adalah tidak ada uang yang akan ditabung karena uang yang ada akan diputar lagi untuk modal usaha. Bagi pelaku industri rumahan yang memiliki rekening bank, mereka membuka rekening bank di BRI, BNI, BUKOPIN, MANDIRI.

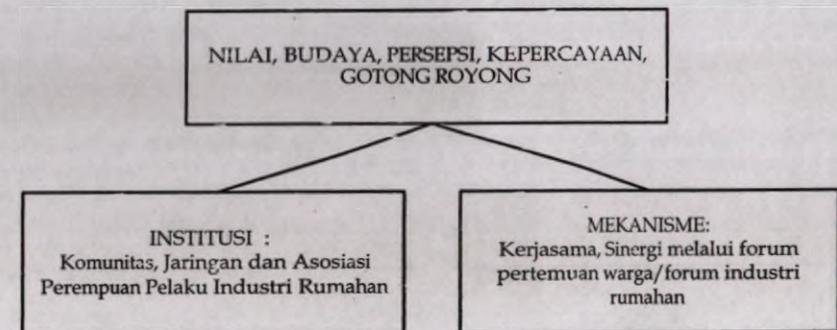
C. Gender equality dan Kapital Sosial dalam Implementasi Kebijakan

Gender equality dalam konteks perempuan sebagai kapital sosial dapat mempertimbangkan simpulan sementara bahwa elemen utama modal sosial terdiri dari *norms*, *reciprocity*, *trust*, dan *network* maka sebenarnya hal tersebut secara historis bukan merupakan fenomena baru dan asing bagi masyarakat di Indonesia, termasuk di Kabupaten Lampung Selatan, karena hal tersebut telah berakar kuat dan terinstitusikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Modal sosial merupakan pilar yang mewujudkan spirit kebersamaan dalam mencapai suatu tujuan (Duadji dan Tresiana, 2020). Perempuan pelaku usaha industri rumahan (IR) di Kabupaten Lampung Selatan yang menjadi amatan penulis memiliki kapasitas berupa entitas spirit dengan daya tahan dan daya juangnya dengan sifat dinamis dan kreatifnya mampu mengatasi beragam problem ekonomi keluarga. Bila diidentifikasi, maka

komponen modal sosial perempuan pelaku IR dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Dari skema tersebut dapat ditunjukkan bahwa perempuan pelaku IR memiliki stok modal sosial berupa nilai budaya gotong royong atau saling membantu dengan motif percaya (*trust*), mekanisme yang terwujud melalui kerjasama dan sinergi dalam beragam aktivitas forum pertemuan pelaku IR, maupun forum warga dan pada akhirnya dapat menjadi bentukan institusi dari entitas perempuan pelaku IR berupa forum IR (asosiasi usaha). Kesiadaan perempuan pelaku IR untuk melibatkan diri dalam berbagai aktivitas sosial dari komunitas atau organisasi sosial tersebut menjadi peluang yang awalnya tidak pernah dikalkulasi secara ekonomi. Dengan kata lain, implikasi ekonomi dari partisipasi aktif perempuan pelaku IR baru dirasakan dampaknya setelah relasi sosial yang semakin intensif ditambah dengan kegiatan produktif.



Sumber: Tresiana dan Duadji, 2020

Gambar 4.1 Modal Sosial Perempuan Pelaku IR

Hal ini seperti yang dilakukan dalam kegiatan pendampingan oleh salah satu tokoh masyarakat (pemuda), perempuan pelaku IR di wilayah Kabupaten Lampung Selatan tanpa harus membentuk kelembagaan sosial baru tetapi masuk dalam forum pertemuan warga (perempuan pelaku IR). Kegiatan arisan dan kumpul-kumpul beralih menjadi media belajar bersama. Introduksi dan edukasi pengelolaan ekonomi keluarga termasuk pengelolaan usaha menjadi muatan utamanya ditambah dengan aktivitas simpan pinjam terbatas, dengan model tanggung renteng (pinjaman kelompok). Forum pertemuan tersebut menjadi semakin dinamis dan produktif karena mampu

menjawab kebutuhan perempuan pelaku IR khususnya dalam pengelolaan usaha yang berimplikasi pada ekonomi keluarga. Dengan demikian, perempuan pelaku IR menjadikan ruang jejaring sosial tersebut sebagai strategi bertahan ketika suatu saat usahanya sedang dilanda masalah. Hal ini dikarenakan mekanisme tanggung renteng dengan basis saling membantu saat ada anggota yang membutuhkan menjadi solusi tercepat atas masalah yang dihadapi perempuan pelaku IR.

Partisipasi aktif perempuan tersebut yang kemudian memberikan kontribusi bagi peningkatan ekonomi keluarga sekaligus penguatan kapasitas melalui kegiatan pendampingan. Hal ini bila dikonseptualisasikan dengan kapital sosial dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dimensi Nilai dan Kultur

Masyarakat yang terdiri dari individu-individu merupakan makhluk sosial dengan ciri saling membutuhkan satu sama lain dalam kehidupannya. Oleh karenanya terdapat kecenderungan untuk saling bekerja sama dan saling berinteraksi termasuk pada saat kondisi bencana dimana semua orang membutuhkan untuk bertahan hidup/melangsungkan kehidupannya. Dalam berinteraksi bukan tanpa suatu nilai dan norma dimana menurut Fukuyama (2000) menjelaskan bahwa "*Social capital can be defined simply as the existence of a certain set of informal values or norms shared among members of a group that permit cooperation among them*". Dominasi ide tertentu dalam masyarakat akan membentuk dan mempengaruhi aturan-aturan bertindak masyarakatnya (*the rules of conducts*) dan aturan-aturan bertingkah laku (*the rules of behaviour*) yang bersama-sama membentuk polapola kultural (*cultural pattern*).

Dari penjelasan di atas dapat dikontekskan dengan aktivitas pendampingan pada perempuan pelaku IR yang mendasarkan pada nilai dan norma masyarakat sebagai bagian dari komponen modal sosial. Pendampingan yang mengadaptasi model kelompok memberi pemahaman bahwa basis nilai dan kultur yang dibangun oleh perempuan pelaku IR dalam kegiatan peningkatan ekonomi keluarga merupakan implikasi dari kesediaan perempuan untuk mengkonsolidasikan diri dengan pihak di luar dirinya termasuk pendamping lembaga/tokoh masyarakat. Selain itu, dimensi nilai dan kultur inilah yang kemudian menjadi 'perekat' interaksi sosial diantara perempuan pelaku IR.

Dimensi Trust, Reciprocity dan Partisipasi

Pembahasan ini lebih melihat pada sisi mekanisme relasi yang terbentuk antar aktor yaitu perempuan pelaku IR dengan pendamping LSM/pemuda terkait dengan kegiatan peningkatan ekonomi keluarga. Bila merujuk pemahaman mengenai kapital sosial dari aspek *reciprocity* ini menurut Fukuyama (1996) modal sosial senantiasa diwarnai oleh kecenderungan saling tukar kebaikan antar individu dalam suatu kelompok atau antar kelompok itu sendiri. Pola pertukaran atau resiprositas ini bukanlah sesuatu yang dilakukan secara resiprokal seketika melainkan suatu kombinasi jangka pendek dan jangka panjang dalam nuansa altruism yaitu semangat untuk membantu dan mementingkan kepentingan orang lain. Meski kemudian konsep *reciprocity* tidak akan dapat berjalan dalam relasi antar individu atau antarkelompok dalam komunitas ketika tidak ada rasa percaya (*distrust*). Selanjutnya, penjelasan mengenai dimensi *trust* ini seperti pendapat Fukuyama (1999) yaitu rasa percaya (*trust*) merupakan suatu bentuk keinginan untuk mengambil resiko dalam hubungan sosialnya yang didasari oleh perasaan yakin bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan saling mendukung. Inilah yang kemudian akan menjadi modal sosial lanjutan untuk membangun suatu jaringan diantara kelompok atau komunitas untuk melakukan kerjasama yang saling menguntungkan. Hal ini sesuai pendapat Fukuyama (1999) bahwa jaringan sebagai modal sosial merupakan hubungan moral kepercayaan yaitu jaringan adalah sekelompok agen-agen individual yang berbagi norma-norma atau nilai-nilai informal melampaui nilai-nilai atau norma-norma yang penting untuk transaksi-transaksi pasar biasa.

Pada pembahasan ini memberikan pemahaman bahwa modal sosial tidak dibangun oleh satu individu melainkan terletak pada kecenderungan yang tumbuh dalam suatu kelompok (komunitas). Penjelasan tersebut bila dikontekskan dengan contoh peran perempuan pelaku IR dalam kelompok dampingan forum IR menunjukkan bahwa kekuatan perempuan pelaku IR ada pada aspek saling percaya dan membutuhkan terhadap kapasitas yang dimiliki oleh masing-masing perempuan. Dari sinilah perempuan pelaku IR dapat saling bertukar informasi untuk menguatkan peran masing-masing dalam melakukan aktivitas peningkatan ekonomi keluarga. Pada

akhirnya perempuan pelaku IR mampu berpartisipasi aktif di lingkungan masyarakatnya yang diharapkan kondisi ini secara jangka panjang dapat terpelihara dengan baik. Selanjutnya, potret modal sosial perempuan pelaku IR dapat dilihat dalam bentuk model modal sosial yang berbeda dari aktivitas pemenuhan ekonomi keluarga.

Model modal sosial perempuan pelaku IR diadopsi dari Duadji dan Tresiana (2020) yang membedakan 3 (tiga) tipe modal sosial yaitu : (1) *Social Bounding*, berupa nilai, kultur, persepsi dan tradisi (custom), yaitu modal sosial dengan karakteristik ikatan yang kuat dalam suatu sistem kemasyarakatan dimana masih berlakunya sistem kekerabatan yang mewujudkan rasa simpati, berkewajiban, percaya resiprositas, dan pengakuan timbal balik nilai kebudayaan yang dipercaya; (2) *Social bridging*, berupa institusi maupun mekanisme yang merupakan ikatan sosial yang timbul sebagai reaksi atas berbagai macam karakteristik kelompoknya; (3) *Social linking*, berupa hubungan/jaringan sosial dengan adanya hubungan di antara beberapa level dari kekuatan sosial maupun status sosial yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian, relasi yang terjalin dalam kegiatan program dan aktivitas perempuan usaha mikro dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Bounding social capital



Sumber: Tresiana dan Duadji, 2020

Gambar 4.2 Bangunan Kapital Sosial Perempuan Pelaku IR

Dari gambar diatas menunjukkan bahwa ketiga level modal sosial di atas memberi pengertian bahwa modal sosial dapat memberi kontribusi bagi terjadinya integrasi sosial sekaligus mengatasi problem seputar pengelolaan usaha maupun ekonomi keluarga perempuan pelaku IR. Dalam hal ini bila mencermati mekanisme relasi diantara aktor yang melibatkan perempuan pelaku IR. dengan pihak pendamping (LSM/pemuda) terkait program pendampingan usaha IR, jelas tergantung pada kapasitas yang ada dalam kelompok masyarakat. Kapasitas yang dimaksud adalah untuk membangun sejumlah asosiasi berikut jaringannya termasuk membangun basis nilai dan trust untuk kemudian saling bekerjasama sebagai unsur resiprositas. Selain itu terletak pula pada kemampuan perempuan pelaku IR. untuk melibatkan diri dalam suatu jaringan hubungan sosial kemasyarakatan.

Penguatan Peran Modal Sosial Perempuan dalam pengembangan usaha IR dengan memanfaatkan modal sosial telah ditunjukkan hasil studi di berbagai negara. Penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sejumlah pakar terhadap berbagai kelompok masyarakat di beberapa negara menemukan bahwa modal sosial berperan penting dalam mencapai keberhasilan ekonomi mereka (Gittel, et al., 2001). Studi ini memperlihatkan bagaimana modal sosial berperan dalam menjalin kerjasama antara masyarakat dengan lembaga-lembaga keuangan yang diharapkan untuk membantu pengembangan usaha masyarakat. Pendekatan modal sosial ini merupakan alternatif dari strategi pengembangan ekonomi masyarakat golongan ekonomi lemah yang lazimnya ditunjang dana yang berasal dari bantuan proyek yang dikelola pemerintah. Keberhasilan ini dimungkinkan karena prinsip dasar modal sosial yang menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dan kepercayaan baik antara sesama warga masyarakat maupun dengan pihak pemberi bantuan, telah dapat menggantikan jaminan berupa agunan yang merupakan peraturan standar dalam pemberian kredit bank pada umumnya. Dengan kata lain modal sosial yang kuat merupakan "agunan" yang dapat diandalkan. Agunan alternatif ini bisa diterima pihak bank karena dalam masyarakat sendiri telah terdapat kesepakatan untuk memikul tanggungjawab bersama dan saling mengontrol antara sesama warga. Penyimpangan yang dilakukan oleh seorang warga di dalam penggunaan dan pengembalian kredit tidak hanya dianggap sebagai masalah pribadi tetapi merupakan tindakan yang menyebabkan hilangnya

kepercayaan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu masyarakat dapat menjatuhkan sanksi sosial terhadap warga yang menyebabkan hilangnya kepercayaan itu. Hal ini sejalan dengan pemikiran Coleman sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa "pilar utama modal sosial berupa struktur sosial yang menciptakan pengungkungan dalam sebuah jaringan sosial yang membuat setiap orang saling berhubungan sedemikian rupa, sehingga kewajiban-kewajiban maupun sanksi-sanksi dapat dikenakan kepada setiap orang yang menjadi anggota jaringan itu" (Coleman, 1988).

Dalam konteks makro pemanfaatan modal sosial ini bila didekatkan dengan pemberdayaan ekonomi perempuan menjadi relevan karena ujung tombak dari kesejahteraan masyarakat diawali dari kesejahteraan individu sebagai bagian dari keluarga. Perempuan memiliki peran strategis dan produktif dalam peningkatan ekonomi keluarga. Keluwesan perempuan dalam membina relasi sosial dengan lingkungan sosialnya menjadikan peluang terbukanya akses sumber daya ekonomi. Hanya saja, keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi seringkali kurang dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan atau problem teknis usaha sehingga membuat tidak mampu bersaing dalam kompetisi pasar. Selain itu problem struktural berupa kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengembangan usaha masih belum banyak berpihak pada kepentingan perempuan. Kondisi ini yang dialami perempuan pelaku IR sehingga rentan bila berhadapan dengan realitas pasar kompetitif. Intensifikasi pemanfaatan modal sosial yang dikoneksikan dengan pemberdayaan ekonomi menjadi solusi untuk memunculkan tindakan kolektif yang berorientasi pada pemunculan aktivitas ekonomi produktif. Modal sosial yang mewujudkan dalam bentuk kohesifitas sosial, semangat gotong royong, tolong menolong, rasa dan semangat untuk saling memberi (reciprocity), trust (rasa saling percaya) dan jaringan sosial (social networking) menjadi energi penopang keberlanjutan usaha dan bertahannya ekonomi. Kondisi ini diamati dari aktivitas perempuan usaha mikro yang dapat dibedakan sebagai berikut: (a) aktivitas bermotif ekonomi yaitu aktivitas terkait dengan upaya perempuan usaha mikro mendapatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga melalui simpan pinjam; dan (b) aktivitas non-ekonomi yaitu aktivitas yang dilakukan dengan tujuan menguatkan ikatan solidaritas

sesama perempuan usaha mikro, misal aktivitas religi maupun sosial budaya (pengajian, arisan maupun budaya rewang). Terkadang hubungan di antara kedua dimensi ini menjadi 'kabur' karena terjadi proses sosial yang saling bertukar, dimana sosiokultural yang ada memberi kontribusi pada usaha yang ada dan sebaliknya logika bisnis dengan kalkulasi ekonomi yaitu efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya baik alam (SDA), tenaga (SDM), modal dan waktu.

Pembahasan penguatan peran modal sosial dalam usaha atau peningkatan ekonomi perempuan pelaku IR, tidak lepas dari adanya upaya jalinan kerjasama di antara aktor yang memiliki kesamaan kepentingan. Dimensi nilai, kultur, dan persepsi dibangun sebagai pondasi awal untuk mengkollektifkan kesamaan kepentingan dalam wadah institusi berupa komunitas forum IR melalui fasilitasi pendampingan LSM/pemuda lokal. Dengan demikian, peran modal sosial dalam peningkatan ekonomi adalah strategis dalam mengatasi kompleksitas masalah yang ada. Solidaritas yang ada mampu memunculkan solusi yang bermanfaat secara kolektif. Selain itu, modal sosial dalam pemahaman untuk kajian pembangunan masyarakat menjadi penting maknanya sebagai acuan analisa untuk aplikasi atas program pembangunan. Hal ini jelas karena dimensi modal sosial dapat mengungkap realitas di masyarakat atas kejadian *distrust*, melemahnya kohesivitas dan solidaritas, indikasi kemiskinan, dan sebagainya karena terkait dengan kearifan lokal berupa nilai dan budaya masyarakat.

4.3. Kapital Sosial: Kebaharuan dalam Implementasi Kebijakan

Kapital sosial dalam konteks analisis ini adalah yang berasal domain publik dalam arti luas. Asumsi kapital sosial sebenarnya adalah merupakan kekayaan nilai yang domainnya di entitas publik dengan berbagai varian. Varian-varian kapital sosial ini dapat saja menjadi elemen pembangun nilai-nilai dari segregasi-segregasi entitas yang diciptakan oleh masyarakat. Negara atau pemerintah adalah salah satu bentuk entitas publik, yang didalamnya bisa saja menolak atau mengenakan kapital sosial yang ada pada entitas-entitas diluarnya (Fukuyama, 1999).

Peran kapital sosial penting sebagai habitat terciptanya kesuksesan implementasi kebijakan dikemukakan Fukuyama (1999) dikarenakan terbangun dalam ikatan-ikatan sosial yang lebih mandiri. Tidak banyak mengandalkan peran-peran formal, namun lebih banyak mengandalkan peran norma-norma informal, yang banyak disediakan oleh kapital sosialnya.

Kesadaran publik, bahwa proses akselerasi interest publik selama ini telah terdistorsi secara struktural adalah merupakan alasan utama mengapa reposisi implementasi kebijakan penting dilakukan. Kecenderungan untuk menggeser lokus pada tataran publik yang lebih luas adalah sebagai realitas, bahwa untuk mencapai tujuan publik diperlukan sebuah konser sosial yang didalamnya terdiri dari resorsis, networking. Peran kapital sosial menempati posisi yang signifikan dalam horison perubahan model implementasi. Kapital sosial dan implementasi kebijakan membangun sebuah hubungan *mutual exclusive*, tidak boleh saling meniadakan. Kapital sosial membekali deposit citra implementasi kebijakan berfungsi dan bersinergi untuk mencapai kesuksesan dan kemaslahatan publik.

Dalam konteks keberlanjutan, peran kapital sosial ini makin penting, bukan sekedar menyediakan nilai dan sistem norma bagaimana tata kelola akan berdinamika, tetapi juga akan menentukan kearah mana sebuah citra masyarakat madani akan bergerak. Nilai-nilai dan sistem sosial yang ang terhimpun dalam kapital sosial masyarakat selama ini perannya telah banyak digantikan oleh pranata-pranata modernisasi yang ternyata hanya memberikan integritas semu. Robert Putnam (1993) dan Francis Fukuyama (1999) adalah merupakan proponent penting yang menemukan kembali peran-peran elemen dasar kehidupan manusia ini dalam percaturan kontemporer. Energi asli dari masyarakat yang selama ini tidak pernah dijadikan modal pembangunan berkelanjutan (Febryano et all, 2020). Karenanya penting untuk mendudukan konsep-konsep kapital sosial dan implementasi dalam konfigurasi kesuksesan implementasi kebijakan.

4.4. Penutup

Implementasi kebijakan menjadi sarana utama untuk mewujudkan tujuan publik utamanya dalam mengalokasikan resorsis publik sehingga terhindar dari distorsi, manipulasi. Implementasi kebijakan memasuki ekologi sosial baru yang sarat dengan sistem nilai misalnya budaya, politik,

informasi, komunikasi. Nilai-nilai formal yang direproduksi secara hirarkis dan rasional membangun watak perubahan, tetapi aspek yang lebih penting dan strategis terletak pada idiom-idiom dan kuadran nilai spontan dan arasional yang menjadi kapital sosial sebuah masyarakat. Karena itu peran kapital sosial dalam kesuksesan implementasi kebijakan menjadi sangat penting dan lebih substantif.

Beberapa hasil penelitian dan pandangan menggambarkan fungsi pemerintah sebagai implementer bukan merupakan pelaku publik yang independen. Efektivitas dan akuntabilitasnya banyak ditentukan sejauhmana publik sebagai konstituennya memberikan garansi dan lisensi bahwa agenda-agenda dan isu-isu yang dijadikan prioritasnya merupakan inklusi preferensi publik. Dukungan politik, loyalitas publik, dan integritasnya terhadap nilai-nilai kepublikan atau bahkan apresiasi publiik terhadap pemerintah sangat ditentukan sejauh mana agen-agen pemerintah menempatkan nilai-nilai kapital sosial dalam proses publik.

-0000-

Proses demokratisasi yang meluas di berbagai negara, tak terkecuali Indonesia telah menggeser peran negara/pemerintah lebih signifikan. Transformasi dari rejim otoritarian ke rejim demokratis juga memberikan implikasi yang besar pada arah baru implementasi kebijakan. Partisipasi masyarakat merancang program, dan implementasi rancangan program mencapai tujuan semakin mengemuka dan signifikan, menjadi mainstream artikulasi publik luas. Implementasi kebijakan memerlukan kehadiran publik dalam artian aktor-aktor lain diluar negara menjadi lebih penting. Aktor-aktor luar negara ini dapat berupa asosiasi-asosiasi mandiri dari rakyat, kelompok-kelompok kepentingan, lembaga swadaya masyarakat, dan agen-agen para negara yang kehadirannya lebih bersifat spontan.

Kehadiran kapital sosial yang tersedia dalam entitasnya berpotensi memberikan garansi bagi perbaikan implementasi kebijakan. Persoalan-persoalan elementer dalam *mainstream* inilah yang dianalisis dalam buku referensi ini. Keberhasilan dan kesuksesan proses dan ketercapaian tujuan implementasi ini banyak ditentukan oleh deposit dan konfigurasi kapital sosial yang tersedia dalam wilayah publik. Bagaimana sinergi antar *governance kebijakan* dan kapital sosial berjalan, bagaimana mengambil peran, dan bagaimana kapital sosial membangun watak implementasi kebijakan atau sebaliknya, semua itu adalah persoalan-persoalan primer yang musti dianalisis dalam perspektif kekinian.

Pada bab-bab sebelumnya, pembahasan dilakukan secara rinci dan mendalam berdasarkan hasil-hasil penelitian yang dilakukan Tim penulis, juga didukung oleh teori-teori yang relevan.

Isu-isu *gender inequality*, *positioning* perempuan pelaku usaha industri rumahan sebagai kelompok rentan, yang semakin rentan di masa pandemi, memunculkan permasalahan dan pertanyaan mengapa lebih banyak kebijakan yang gagal diimplementasikan, dibanding yang berhasil. Hal ini telah menimbulkan keprihatinan. Implementasi kebijakan berlandaskan swadaya murni (koproduksi) tanpa bantuan dan intervensi dari pihak luar, pada beberapa studi penelitian dapat membawa dampak positif yakni terciptanya rasa memiliki yang kuat pada seluruh target sasaran.

Praktek-praktek dan model social engeneering telah lama hidup di masyarakat, terutama ketika masyarakat mencari solusi secara mandiri atas kesulitan dan permasalahan hidup, utamanya dalam bentuk kreativitas masyarakat. *Social engeneering* menjadi model strategi yang direkomendasikan sebagai jembatan mengantisipasi kegagalan implementasi kebijakan. Skema social engeneering senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan (pemerintah). Model ini membantu mengembangkan dan dapat mendekatkan perempuan pelaku usaha industri rumahan terhadap akses modal, akses informasi dan teknologi, akses pasar, akses pelatihan. Hal ini pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan ketahanan keluarga serta kehidupan berkelanjutan (*sustainable livelihood*).

Implementasi kebijakan menjadi sarana utama untuk mewujudkan tujuan publik utamanya dalam mengalokasikan resorsis publik sehingga terhindar dari distorsi, manipulasi. Implementasi kebijakan memasuki ekologi sosial baru yang sarat dengan sistem nilai misalnya budaya, politik, informasi, komunikasi. Nilai-nilai formal yang direproduksi secara hirarkis dan rasional membangun watak perubahan, tetapi aspek yang lebih penting dan strategis terletak pada idiom-idiom dan kuadran nilai spontan dan arasional yang menjadi kapital sosial sebuah masyarakat. Karena itu peran kapital sosial dalam kesuksesan implementasi kebijakan menjadi sangat penting dan lebih substantif.

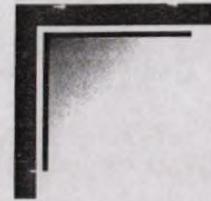
Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas, dapat diajukan beberapa rekomendasi.

Pertama, Kecerdasan aktor-aktor pemerintah termasuk didalamnya birokrat dan pejabat publik lainnya dalam memungut nilai-nilai kapital sosial, kemudian menginkorporasikannya dalam proses implementasi kebijakan adalah merupakan investasi penting agar terhindar dari kegagalan implementasi;

Kedua, pemerintah dapat memperluas jangkauan akuntabilitasnya karena responsif pada kepentingan rakyat lebih luas dibanding dengan kepentingan-kepentingan kelompok yang lebih kecil.

Ketiga, memperbesar kapasitas inovasi dalam proses partisipasi/pengambilan keputusan ketika berhadapan dengan tantangan-tantangan baru.

-00000-



DAFTAR PUSTAKA

- Akib, H. and Tarigan, A. (2008) "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya," *Jurnal Baca*, Volume 1 Agustus 2008, Universitas Pepabari. Makassar.
- Alkire, S., A. et all. (2001) "Community Driven Development". World Bank Draft for Comments.
- Anderson, J. E. (2011) *Public Policy Making*, Boston: Waddworth
- Birkland, T.A. (2001) *An Introduction to the Policy Process*, M.E . Sharpe Inc., Armonk NY
- Coleman, J.S. (1988) 'Social capital in the Creation of Human Capital' *American Journal of Sociology* 94: S95-S120.
- Carroll, T. F. (2001) "Social Capital, Local Capacity Building, and Poverty Reduction" (Social Development Papers No. 3, Office of Environment and Social Development, Asian Development Bank)
- Darwin, M. (2000) *Good Governance dan Kebijakan Publik*, Makalah disampaikan dalam Forum Seminar Forum LSM Yogyakarta bertema : Mewujudkan *Good Governance* sebagai Agenda Sebuah Negara Demokrasi , tanggal 30 September 2000, Yogyakarta
- Duadji, N. (2012) *Good Governance* dalam Pemerintah Daerah. *Jurnal Mimbar* Volume 28 N0 2, Tahun 2012, Halaman 201-209. ISSN 0215-8175, Penerbit Unisba Pusat Penerbitan Universitas (P2U-LPPM).

- Duadji, N. and Tresiana, N. (2018) A Participation model based on community forum as reproductive health knowledge transaction space to increase male participation in vasectomy. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Universitas Airlangga*, Volume 31 Nomor 1, Maret 2018, 1-13/ 13 (tiga belas) Halaman, ISSN 2086-7050, Penerbit Airlangga University Press
- Duadji, N. and Tresiana, N. (2020) LENSES KAPITAL SOSIAL DAN REPOSISI ADMINISTRASI PUBLIK: Membangun *Bridging Social Capital* Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Melalui Desa Ramah Anak. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Edstrom, J. (2002) Indonesia 's Kecamatan Development Project: Is It Replicable? (Social Development Project, The World Bank, Paper No. 39).
- Etzkowitz, H. (2008) *The Triple Helix : University, Industry, Government Innovation in Action*. Routledge Taylor& Francis Group. New York and London
- Febryano, Indra Gumay et al. (2020) Cantrang: A Dilemma in Policy Implementation (Case in Lampung Bay, Indonesia). *PROBLEMY EKOROZWOJU - PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT* 2021, 16(1), 133-142
- Friedmann, J. (1992) *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. Oxford: Blackwell.
- Fukuyama, F. (1996) *Trust: The Social Virtues and The Creation of Prosperity*, Free Press Paperback Book, Simon and Schuster, New York
- Fukuyama, F. (1999) *Social Capital and Civil Society*, Paper for delivery at the IMF Conference on Second Generations Reforms, The Institute of Public Policy, George Mason University. Available at <http://www.imf.com>. 21 p.
- Gittel, R. and Thompson, J.P. (2001) "Making Social Capital Work: Social Capital and Community Economic Development" dalam Saegert, Susan, J. Phillip Thompson and Mark R. Warren (eds.) *Social Capital and Poor Communities*. New York: Russell Sage Foundation, pp. 115-135.

- Gittel, R. and Thompson, P.J. (2001) " Making Social Capital Work: Social Capital and Community Economic Development" dalam Saegert, Susan, J. Phillip Thompson and Mark R. Warren (eds.) *Social Capital and Poor Communities*. New York: Russell Sage Foundation, pp. 115-135
- Goggin, M.L. et al. (1990) *Implementation, Theory and Practice*, Scott, Foresmann and Company, USA
- Grindle, M.S. (1980) *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princeton University Press, New Jersey.
- Heidi, W. et al, (2019) "Social Engineering through Social Media: An Investigation on Enterprise Security", <http://csusap.csu.edu.au/~mbhattac/pub/ATIS-2014-HW-MBRI..>, diakses 20 November 2019
- Heineman, R.A et al. (1997) *The World of Policy Analyst*, Chatham House Publishers, Inc. Chatham NY.
- Keban, Y.T. (2007) *Pembangunan Birokrasi di Indonesia*, Pidato Pengukuran Guru Besar pada FISIP UGM, Yogyakarta.
- Korten, D.C and Syahrir (1980) *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Knack, S. (2000) *Social Capital and the Quality of Government : Evidence from the U.S. States*, World Bank Paper, available at <http://www1.worldbank.org/publicsector/>
- Lester, J. P. (1994) *A New Federalism? Environmental Policy in the state in Environmental Policy in the 1990s*, ed. Norman Vig and Michael Kraft, Congresson Quarterly Press: Washington DC
- Matland, R.E. (1995) Synthesizing The Implementation Literature: The Ambiguity-Conflict Model of Policy Implementation, in: *Journal of Public Administration Research and Theory*, 5(2), p. 145-174.
- Mernissi, F. (1997), "Social Capital in Action: The Case of the Ait Iktel Village Association" "<http://poverty.worldbank.org/library/topic/4294/5033>)

- Ostrom, E. (1996) "Crossing the Great Divide: Coproduction, Synergy, and Development." *World Development*, Vol. 24, No. 6 (June 1996), 1073-87
- Parsons, W. (1995) *Public Policy, an introduction to the theory and practice of policy analysis*,
- Porter, M.E. (1998) *Cluster and New Economics of Competition*, *Harvard Business Review*, Nov/Dec 98, Vol 76 Issue 6, p77.
- Putnam, R.D. (1993) *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*, Princeton: Princeton University Press.
- Quade, E.S. (1984) *Analysis For Public Decisions*, Elsevier Science Publishers, New York.
- Ripley, R.B. and Franklin, G.A. (1986) *Policy Implementation and Bureaucracy*, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis.
- Sabatier, P. (1986) "Top down and Bottom up Approaches to Implementation Research" *Journal of Public Policy* 6, (Jan), h. 21-48.
- Shrestha, R.K. (2015) Building Social Capital Within the Framework of Agricultural Cooperatives Development in Rural Nepal, *International Journal of Asian Business and Information Management*, 6 (3): 26-38
- Tresiana, N. and Duadji, N. (2020) Model Koproduksi Pengembangan Program Padat Karya Tunai Desa dalam Menangkal Dampak Covid19 yang mendukung *Gender equality* di Kabupaten Lampung Selatan. Laporan Penelitian Skema Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2020,. Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM), Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kemendikbud dan Pendidikan Tinggi. Bandar Lampung (Tidak dipublikasikan)
- Tresiana, N. and Duadji, N. (2019) Laporan Penelitian Skema Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2019, Model Klaster dalam Pengembangan Industri Rumahangan Perempuan dalam Mewujudkan *Gender equality* di Kabupaten Lampung Selatan. Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM), Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Bandar Lampung (Tidak dipublikasikan).

- Tresiana, N. et all. (2018) Laporan Survei Analisis Potensi Industri Rumahangan di Kabupaten. Lampung Timur. Kerjasama LPPM Unila dan KPPPA RI, Bandar Lampung. (Tidak dipublikasikan)
- Tresiana, Novita and Duadji, N. (2016) Multi Stakeholders *Governance Body Model* in Achieving the Excellence Public Policy. *Jurnal Mimbar (Social and Development Journal)*, Vol. 32 Nomor 2, Desember Tahun 2016, Hal 401-411, ISSN: 2303-2499, Penerbit Unisba Pusat Penerbitan Universitas (P2U-LPPM).
- Tresiana, N. (2015) Perumusan Kebijakan Pendidikan Yang berperspektif Gender di Propinsi Lampung. *Jurnal Borneo Administrator*. Volume 11 Nomor 2, Agustus 2015, Halaman 152-177/25 Halaman. ISSN 1858-0300. Penerbit Pusat Kajian Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III Lembaga Administrasi Negara (PKP2A III LAN).
- Tresiana, N. and Duadji, N. (2021) Policy Cluster: Affirmative Empowerment and Strengthening of Coastal Community Women Home Industries dalam Tresiana dan Duadji, 2020). *Proceedings of the International Conference on Sustainable Biomass (ICSB 2019)*, *Advances in Engineering Research*, volume 202. 11-20
- Tresiana, N. and Duadji, N. (2019) MEWUJUDKAN *Gender equality* MELALUI PENGEMBANGAN INDUSTRI RUMAHAN PEREMPUAN. *Jurnal Musawa*, Vol. 18, No. 2, Juli 2019, 119-131
- Tresiana, N. and Duadji, N. (2020) Environment and polemic of cantrang ban in Lampung bay: The importance of stakeholder mapping. *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science* 739
- Wahab, S.A. (1991) Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan, Bumi Aksara Jakarta
- Wibawa, S. (1994) *Kebijakan Publik*, Intermedia Jakarta.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK

Pentingnya Kapital Sosial dan Koproduksi

Buku referensi ini membahas fenomena kegagalan implementasi kebijakan dan bertujuan mengidentifikasi factor dan variable penjelas kegagalan implementasi kebijakan. Kebaharuan buku terletak pada hadirnya konfigurasi kapital sosial dan pendekatan koproduksi (keswadayaan) sebagai elemen kunci mengantisipasi kegagalan implementasi kebijakan. Pembahasan buku ini dilengkapi dengan hasil penelitian Tim Penulis selama 2 tahun (2019-2020), dan didukung perkembangan studi terbaru dari implementasi kebijakan public dan perubahan sosial.



Dr. Novita Tresiana, Lahir di Bandar Lampung, 18 September 1972. Merupakan peneliti dan praktisi dibidang Sosial, fokus pada GESI (Gender Equality dan Social Inclusion), kebijakan publik, pembangunan, lingkungan, hutan, SDGs. Penulis juga sebagai Narasumber, pendamping, fasilitator daerah bagi perencanaan, penganggaran responsif gender (PPRG), Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM), Gender dan Politik. Pengalaman kerjasama penelitian bersama dengan BPS Pusat (2016-2017), KPPPA RI (2016-2019), Pemerintah Daerah Propinsi Lampung (2016-2019), aktif mengikuti konferensi skala nasional maupun internasional.



Dr. Noverman Duadji, M.Si, Lahir di Tebat Gunung (Desa Lembah Gunung Dempo) Kota Pagaram Sumatera Selatan, 03 November 1969, adalah dosen tetap Public Administration Departement FISIP Unila. Jabatan fungsional saat ini Assoc. Prof (Lektor Kepala). Jabatan yang pernah diemban adalah Kepala Laboratorium AKP Administrasi Negara/Publik FISIP Unila, Ketua Jurusan Administrasi Negara/Publik, Ketua Bidang Tata Laksana & SDM SPI Unila. Menjadi anggota Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) sebagai koordinator Provinsi Lampung dan anggota IAPA. Selain aktif mengajar juga banyak terlibat dalam kegiatan NGO dan pemberdayaan masyarakat, khususnya petani dan persoalan hutan. Aktif meneliti baik skala nasional maupun internasional dengan artikel yang sudah banyak dipublikasikan. Aktif menulis dan sudah banyak menghasilkan buku referensi yang beredar secara nasional. Konferensi telah banyak yang diikuti, baik skala nasional maupun internasional.

Diterbitkan Atas Kerjasama dengan



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT, UNIVERSITAS LAMPUNG

ISBN: 978-623-7572-18-3



9 786237 157218 3